

SOSIAL BUDAYA

3.1. Kependudukan

Penduduk adalah salah satu elemen paling fundamental dalam kehidupan suatu negara, daerah atau wilayah. Demografi penduduk adalah studi tentang populasi manusia, termasuk berbagai aspek seperti jumlah penduduk, komposisi usia, jenis kelamin, etnisitas, distribusi geografis, pertumbuhan, migrasi, dan berbagai faktor lain yang memengaruhi struktur populasi.

Demografi penduduk adalah alat penting bagi pemerintah, peneliti, dan pembuat kebijakan untuk memahami dan merencanakan masa depan suatu masyarakat. Melalui analisis demografi, kita dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin timbul, mengantisipasi kebutuhan masyarakat, dan merancang kebijakan yang relevan dan efektif.

Dengan demikian, demografi penduduk adalah lebih dari sekadar statistik angka. Ia menggambarkan kisah hidup manusia dalam masyarakat, membantu kita memahami bagaimana masyarakat berubah seiring waktu, dan menjadi dasar untuk pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

1. Penyebaran dan Tingkat Kepadatan Penduduk

Ketika kita memeriksa demografi penduduk suatu wilayah, kita dapat memahami banyak hal tentang masyarakat di sana. Salah satu elemen penting adalah jumlah penduduk. Berapa banyak orang yang tinggal di wilayah tersebut adalah informasi kunci dalam perencanaan pembangunan, alokasi sumber daya, dan penentuan kebijakan publik.

Berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa, jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa dalam rentang waktu 5 tahun terakhir (2019-2023) mengalami peningkatan sebesar 71.816 jiwa atau tumbuh 15,69%, yakni dari 457.671 jiwa pada tahun 2019 menjadi 529.487 jiwa pada tahun 2023.

Tabel 3. 1 Perkembangan Populasi Penduduk dan Sex Ratio Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023

Tahun	Penduduk (jiwa)			Pertumbuhan (%)			Sex Ratio
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
2019	233.508	224.163	457.671	0,87	0,83	0,85	104,17
	51,02%	48,98%	100%				
2020	253.570	254.458	508.028	8,59	13,51	11,00	99,65
	49,91%	50,09%	100%				
2021	256.835	258.376	515.211	1,29	1,54	1,41	99,40
	49,85%	50,15%	100%				
2022	260.058	262.299	522.357	0,48	1,29	0,88	99,15
	49,78%	50,22%	100%				
2023	263.272	266.215	529.487	1,24	1,49	1,36	98,89
	49,72%	50,27%	100%				

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa

Hingga tahun 2023, keseimbangan jenis kelamin menjadi lebih merata, dengan 263.272 laki-laki (49,72%) dan 266.215 perempuan (50,28%). Rasio jenis kelamin yang mencapai 98,89 menandakan bahwa populasi perempuan hanya sedikit lebih banyak dibanding populasi laki-laki.

Rasio jenis kelamin yang seimbang ini biasanya dianggap sebagai indikator kesejahteraan sosial. Ini berarti bahwa ada jumlah pria dan wanita yang relatif setara dalam populasi. Ketika rasio jenis kelamin berada dalam kisaran yang wajar, hal ini dapat mencerminkan stabilitas sosial dan ketahanan populasi.

Kondisi ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam pemenuhan berbagai ragam aspek pelayanan, dengan perkembangan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dalam 5 tahun terakhir sebagaimana

pada tabel 3.1 dan rasio jenis kelamin di setiap kecamatannya seperti pada tabel 3.2 sebagai berikut.

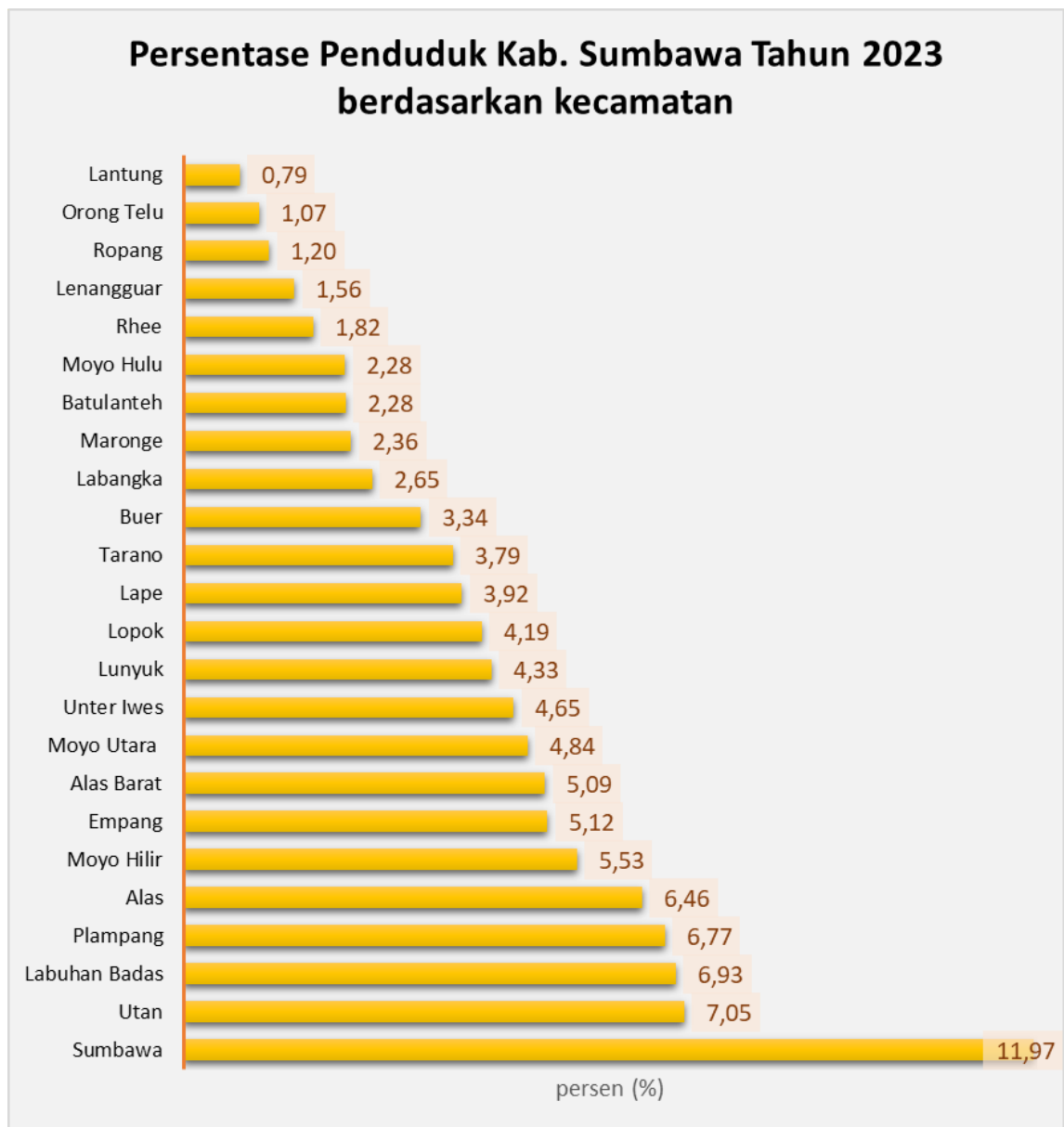
Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Tiap Kecamatan Tahun 2023

No.	Kecamatan	Penduduk Laki- laki	Penduduk Perempuan	Total Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
1	Lunyuk	11.780	11.159	22.939	105,57
2	Orong Telu	2.943	2.702	5.645	108,92
3	Alas	16.817	17.384	34.201	96,74
4	Alas Barat	13.384	13.555	26.939	98,74
5	Buer	8.575	9.121	17.696	94,01
6	Utan	18.310	19.028	37.338	96,23
7	Rhee	4.744	4.894	9.638	96,94
8	Batulanteh	6.314	5.779	12.093	109,26
9	Sumbawa	31.503	31.859	63.362	98,88
10	Labuhan Badas	18.403	18.307	36.710	100,52
11	Unter Iwes	12.316	12.290	24.606	100,21
12	Moyohilir	14.355	14.942	29.297	96,07
13	Moyo Utara	5.925	6.121	12.046	96,80
14	Moyohulu	12.569	13.079	25.648	96,10
15	Ropang	3.196	3.178	6.374	100,57
16	Lenangguar	4.138	4.127	8.265	100,27
17	Lantung	2.045	2.142	4.187	95,47
18	Lape	10.400	10.340	20.740	100,58
19	Lopok	10.921	11.287	22.208	96,76
20	Plampang	17.910	17.960	35.870	99,72
21	Labangka	7.071	6.959	14.030	101,61
22	Maronge	6.162	6.312	12.474	97,62
23	Empang	13.394	13.730	27.124	97,55
24	Tarano	10.097	9.960	20.057	101,38
Jumlah		263.272	266.215	529.487	98,89
Tahun 2022		260.058	262.299	522.357	99,15
Tahun 2021		256.835	258.376	515.211	99,40
Tahun 2020		253.570	254.458	508.028	99,65
Tahun 2019		233.508	224.163	457.671	104,17

Sumber : Long Form Sensus Penduduk 2020, BPS Kab. Sumbawa

Sebaran penduduk merujuk pada cara penduduk mendistribusikan diri mereka dalam wilayah tersebut. Wilayah dengan sebaran penduduk merata memiliki penduduk yang terdistribusi secara seragam di seluruh wilayah, sedangkan wilayah dengan sebaran penduduk tidak merata

memiliki konsentrasi penduduk yang lebih tinggi di beberapa area tertentu. Berdasarkan Gambar 3.1, persebaran penduduk Kabupaten Sumbawa di 24 Kecamatan masih berkonsentrasi di Kecamatan Sumbawa sebagai pusat kegiatan pemerintahan yaitu sebanyak 11,97% dari keseluruhan populasi mendiami kecamatan ini. Sebaran penduduk yang lebih rendah terlihat di Kecamatan Lantung, Orong Telu dan Ropang dimana keadaan ini dipengaruhi oleh kontur tanah yang masih sulit diakses oleh moda transportasi.



Gambar 3. 1 Sebaran Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (%) di Kabupaten Sumbawa Tahun 2023
Sumber data: Long Form Sensus Penduduk 2020, BPS Kab. Sumbawa

Berdasarkan tingkat kepadatannya, Kecamatan Sumbawa merupakan kecamatan yang terpadat, yang rata-rata dihuni oleh 1.413 jiwa per km², diikuti kecamatan Unter Iwes sebesar 299 jiwa per km² dan Kecamatan Alas sebesar 278 jiwa per km². Sementara 7 (tujuh) kecamatan lainnya memiliki kepadatan penduduk dari 101 jiwa per km² sampai dengan 240 jiwa per km² yaitu Kecamatan Lape, Buer, Moyo Utara, Lopok, Moyo Hilir, Alas Barat, dan Utan. Sedangkan kecamatan lainnya memiliki kepadatan 100 jiwa per km² ke bawah, dengan kepadatan penduduk paling rendah yakni Kecamatan Orong Telu sebesar 12 jiwa per km².

Bila diakumulasi penduduk Kabupaten Sumbawa sejumlah 529.487 jiwa dengan luas wilayah 6.643,98 km², maka setiap km² dihuni oleh sekitar 80 jiwa, hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Sumbawa masih jarang dibandingkan dengan luas wilayah. Sebagian besar penduduknya terpusat di sekitar bagian tengah hingga barat kabupaten Sumbawa seperti di Kecamatan Sumbawa, Kecamatan Unter Iwes, hingga Kecamatan Alas. Sementara kepadatan terendah berada di wilayah bagian timur hingga selatan. Hal ini juga menunjukkan arah perpindahan penduduk dari bagian timur dan selatan ke pusat kabupaten Sumbawa baik untuk alasan bekerja ataupun bersekolah.

Besaran penduduk ini harus dapat dipertahankan pada tingkat tertentu, agar kondisi daerah dapat tetap terjaga, baik dari segi estetika, kenyamanan dan kesehatan guna menghasilkan penduduk yang berkualitas.



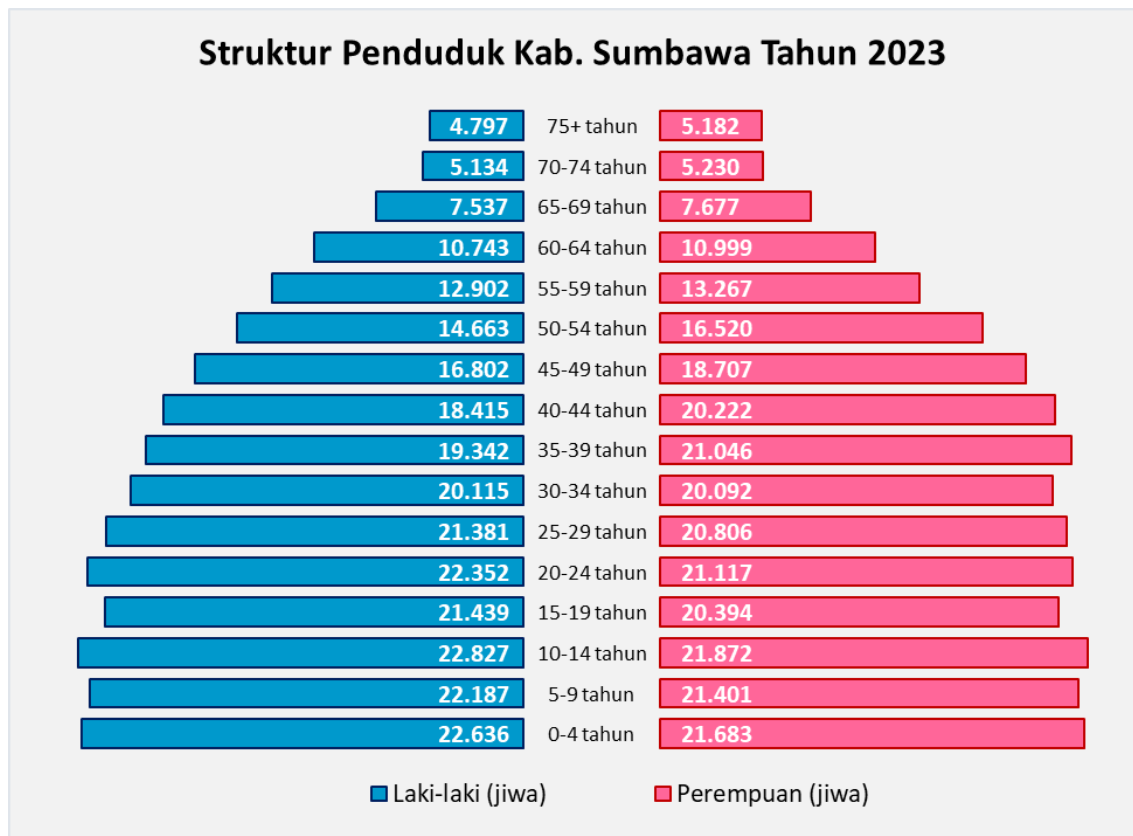
Gambar 3. 2 Kepadatan Penduduk per Kecamatan (jiwa per km²) di Kabupaten Sumbawa Tahun 2023.
Sumber data: Long Form Sensus Penduduk 2020, BPS Kab. Sumbawa

2. Struktur Usia Penduduk

Persebaran penduduk menurut usia sangat diperlukan untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan banyak sektor seperti tenaga kerja, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Dengan mengetahui sebaran penduduk kelompok usia dominan di suatu wilayah maka dapat dilakukan kebijakan yang lebih tepat dan efisien untuk pengembangan wilayah tersebut.

Piramida penduduk Kabupaten Sumbawa berbentuk ekspansif. Hal ini tampak dari sebagian besar penduduk terdapat pada kelompok usia muda atau bagian bawah piramida melebar dan semakin meruncing

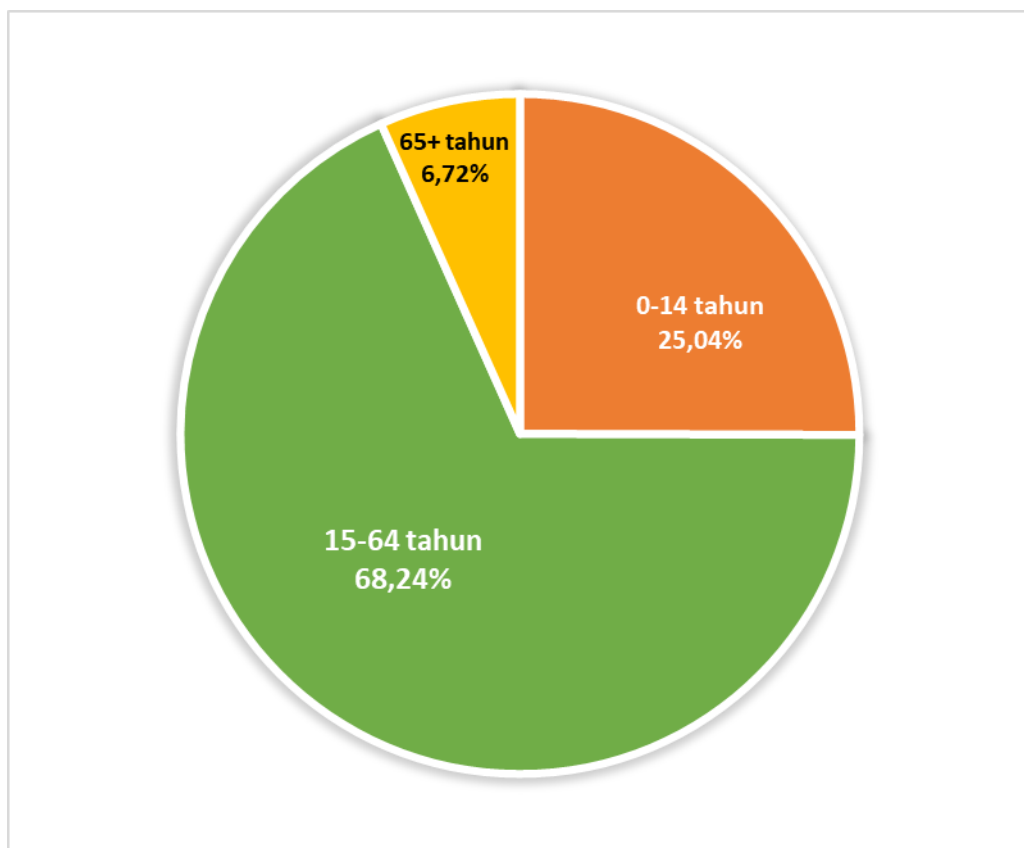
pada bagian atas yang merupakan kelompok pensiunan dan lanjut usia. Bagian bawah melebar menunjukkan terjadinya kelahiran yang cukup tinggi pada tahun-tahun sebelumnya yang mana juga menjadikan kelompok usia 10-14 tahun mendominasi populasi penduduk Kabupaten Sumbawa sejumlah 44.699 jiwa (Laki-laki: 22.827 jiwa dengan proporsi 8,67% dan Perempuan: 21.872 jiwa dengan proporsi 8,22%). Piramida ekspansif Kabupaten Sumbawa menunjukkan pertumbuhan penduduk yang cepat dan potensi bonus demografi. Tantangannya saat ini adalah bagaimana Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyediakan pendidikan dan lapangan kerja bagi generasi muda ini. Struktur usia penduduk Kabupaten Sumbawa tergambar sebagaimana di bawah ini.



Gambar 3. 3 Struktur Penduduk Kabupaten Sumbawa Tahun 2023
Sumber Data: Long Form Sensus Penduduk 2020, BPS Kab. Sumbawa

Dari piramida penduduk di atas, penduduk Kabupaten Sumbawa dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok usia non produktif dan kelompok usia produktif. Kelompok usia non produktif adalah penduduk muda dengan rentang usia antara 0-14 tahun dan penduduk tua dengan

usia >65 Tahun, sementara kelompok usia produktif adalah penduduk dengan rentang usia antara 15 - 64 tahun. Berdasarkan rincian penduduk Kabupaten Sumbawa menurut kelompok usia menunjukkan bahwa proporsi penduduk di bawah usia 15 tahun masih tinggi, yaitu sebesar 25,04% (132.606 jiwa), sedangkan penduduk dengan usia 15 – 64 tahun (usia produktif) cukup signifikan yaitu lebih dari separuh total jumlah penduduk sebesar 68,24% (361.324 jiwa). Untuk penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) menunjukkan proporsi sebesar 6,72% (35.557 jiwa), sebagaimana tergambar dibawah ini.

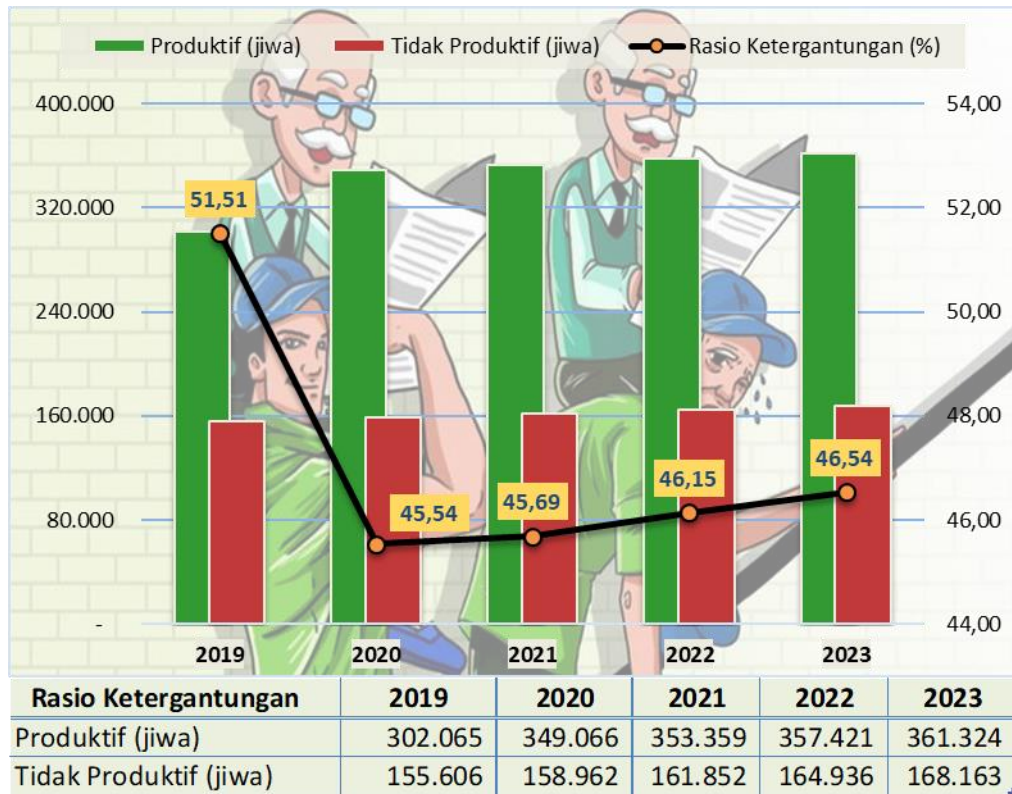


Gambar 3. 4 Proporsi Penduduk Berdasarkan Umur Produktif dan Tidak Produktif di Kabupaten Sumbawa Tahun 2023

Sumber Data: Long Form Sensus Penduduk 2020, BPS Kab. Sumbawa

Angka ketergantungan (dependensi rasio) diartikan sebagai perbandingan antara jumlah penduduk usia non produktif terhadap penduduk usia produktif. Tingkat ketergantungan atau dependensi rasio berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi suatu daerah. Komposisi menurut jumlah kelompok usia tersebut menunjukkan bahwa rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Sumbawa adalah 46,54%,

artinya untuk setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung 46 orang penduduk tidak produktif. Kondisi ini terus mengalami peningkatan setelah di tahun-tahun sebelumnya mengalami penurunan.



Gambar 3. 5 Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023
Sumber : Long Form Sensus Penduduk 2020, BPS Kab. Sumbawa (diolah)

Bonus demografi adalah suatu kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif (usia 15 – 64 tahun) di suatu wilayah jauh lebih besar jika dibandingkan dengan penduduk nonproduktif (usia 0 – 14 tahun dan diatas 65 tahun). Bonus demografi adalah masa dimana angka beban ketergantungan (*Dependency Ratio*) antara penduduk usia produktif dengan penduduk usia non produktif mengalami penurunan sehingga mencapai angka di bawah 50. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa setiap penduduk usia kerja (produktif) menanggung sedikit penduduk usia tidak produktif, artinya beban penduduk relatif lebih ringan dan kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan semakin terbuka. Guna mendapatkan “bonus” demografi dalam artian sebenarnya, maka kualitas SDM harus ditingkatkan secara maksimal melalui pendidikan, pelayanan kesehatan dan penyediaan lapangan pekerjaan. Lebih lanjut disebutkan

bahwa Bonus demografi bisa menjadi “bencana” demografi, ketika usia produktif tersebut tidak memiliki pendidikan yang memadai, tidak memperoleh keterampilan yang cukup. Ketika hal ini terjadi maka penduduk usia produktif akan menjadi pengangguran, dan akan ada konsekuensinya antara lain kemiskinan karena ketidakberdayaan dalam ekonomi, sehingga tidak mampu untuk memenuhi standar kebutuhan dasar yang diperlukan oleh seorang penduduk.

3.2. Pendidikan

Pendidikan adalah fondasi utama dalam pembangunan individu dan masyarakat. Ia membentuk mentalitas, membuka wawasan, dan memberikan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan kehidupan. Lebih dari sekadar proses akademik di ruang kelas, pendidikan adalah perjalanan panjang menuju pengetahuan, pemahaman, dan pertumbuhan pribadi.

Dalam setiap tahapnya, pendidikan memainkan peran kunci. Pendidikan anak usia dini menumbuhkan dasar kecerdasan dan kemampuan sosial. Pendidikan dasar memberikan bekal keterampilan membaca, menulis, dan berhitung yang esensial dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, pendidikan menengah mempersiapkan siswa untuk menghadapi kompleksitas dunia dan memilih jalur karir yang sesuai dengan minat dan bakat mereka.

Sistem pendidikan yang kuat memerlukan peran aktif dari semua pemangku kebijakan, termasuk pemerintah, guru, orang tua, dan komunitas. Diperlukan investasi dalam fasilitas, kurikulum yang relevan, dan pengembangan profesional bagi pendidik. Lebih dari itu, pendidikan harus mengakomodasi keberagaman dan mempertimbangkan berbagai kebutuhan dan gaya belajar.

Capaian di bidang pendidikan terkait erat dengan ketersediaan fasilitas pendidikan. Idealnya semakin tinggi tingkat pendidikan diikuti dengan semakin berkurangnya beban jumlah murid yang diajar. Selain itu, semakin tinggi jenjang pendidikan, keberadaan sekolah juga semakin sedikit.

Tabel 3. 3 Kondisi Pendidikan Menurut Tingkat Sekolah

Tingkat Sekolah	Sekolah	Guru	Murid
-----------------	---------	------	-------

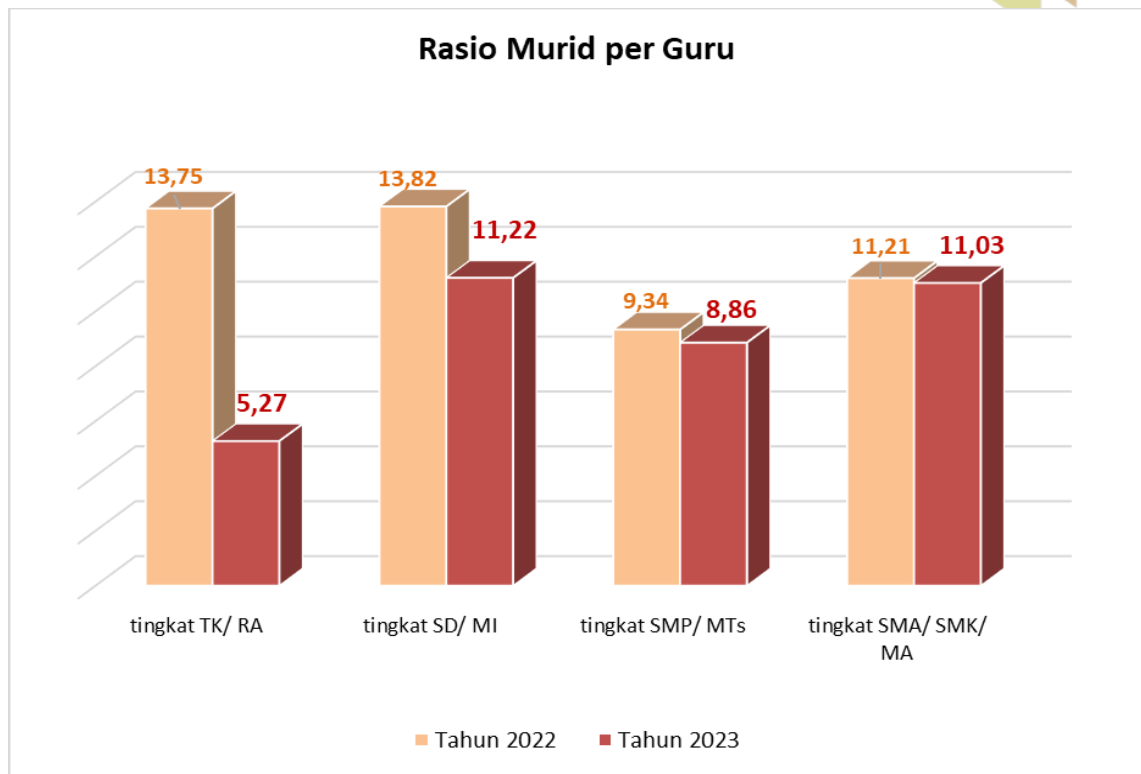
	2022/ 2023	2023/ 2024	2022/ 2023	2023/ 2024	2022/ 2023	2023/ 2024
TK (<i>Taman Kanak - kanak</i>)	588	604	1.585	2.808	22.646	14.316
RA (<i>Raudhatul Anfhal</i>)	36	36	157	161	1.303	1.328
SD (<i>Sekolah Dasar</i>)	372	374	3.586	4.376	50.890	49.602
MI (<i>Madrasah Ibtidaiyah</i>)	29	29	381	395	3.922	3.919
SMP (<i>Sekolah Menengah Pertama</i>)	109	114	1.805	1.952	17.901	17.928
MTs (<i>Madrasah Tsanawiyah</i>)	32	32	630	631	4.830	4.949
SMA (<i>Sekolah Menengah Atas</i>)	27	27	736	745	10.197	10.619
SMK (<i>Sekolah Menengah Kejuruan</i>)	20	21	693	702	7.278	6.979
MA (<i>Madrasah Aliyah</i>)	19	19	327	344	2.204	2.158
Jumlah	1.232	1.256	9.900	12.114	121.171	111.798

Sumber Data: Sumbawa dalam angka 2024

Catatan : Data Tingkat PAUD masih digabung dengan data tingkat TK

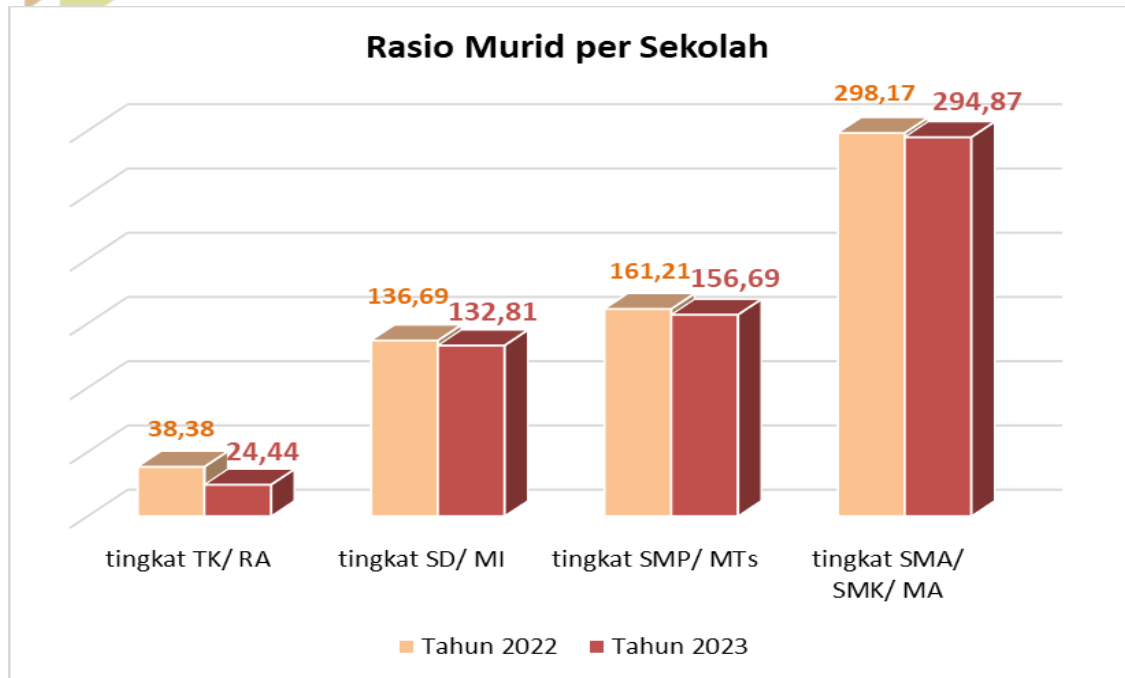
Salah satu indikator untuk melihat pemerataan sarana dan prasarana pendidikan adalah rasio antara murid dengan guru. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah.

Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru menyebutkan bahwa pada jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA idealnya satu guru bertanggung jawab terhadap 20 murid. Sedangkan, pada jenjang SMK idealnya satu guru bertanggung jawab pada 15 murid. Maka berdasarkan Gambar 3.6 rasio murid terhadap guru dalam suatu kelas di tiap jenjang pendidikan di Kabupaten Sumbawa masih terbilang ideal dimana kondisi ini memberikan keleluasaan bagi guru dalam mengawasi dan memperhatikan murid-muridnya.



Gambar 3. 6 Perbandingan Rasio Murid per Guru di Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 dan Tahun 2023
Sumber Data: Sumbawa dalam angka 2024 (diolah)

Kemudian, pengelolaan rasio murid terhadap sekolah pun merupakan bagian penting dari perencanaan dan kebijakan pendidikan. Pemerintah dan otoritas pendidikan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa rasio ini seimbang dan sesuai dengan kapasitas dan sumber daya yang tersedia di setiap wilayah. Hal ini membantu memastikan akses yang setara, lingkungan pembelajaran yang efektif, dan kualitas pendidikan yang baik bagi semua siswa.



Gambar 3. 7 Perbandingan Rasio Murid per Sekolah di Kabupaten Sumbawa
Tahun 2022 dan Tahun 2023
Sumber Data: Sumbawa dalam angka 2024 (diolah)

Penting untuk diingat bahwa pendidikan yang berkualitas tidak hanya bergantung pada rasio murid-guru-sekolah, tetapi juga pada berbagai faktor lainnya, termasuk kurikulum, manajemen sekolah, dukungan orang tua, dan udaya sekolah yang mendukung pembelajaran. Oleh karena itu, dalam mengevaluasi sistem pendidikan, penting untuk mempertimbangkan rasio murid-guru sebagai bagian dari gambaran yang lebih luas tentang kualitas pendidikan.

Selain rasio murid-guru-sekolah, terdapat beberapa ukuran dasar atau indikator yang sering digunakan untuk mengevaluasi sistem pendidikan yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS), Rata-rata Lama sekolah (RLS), Angka Harapan Sekolah (HLS).

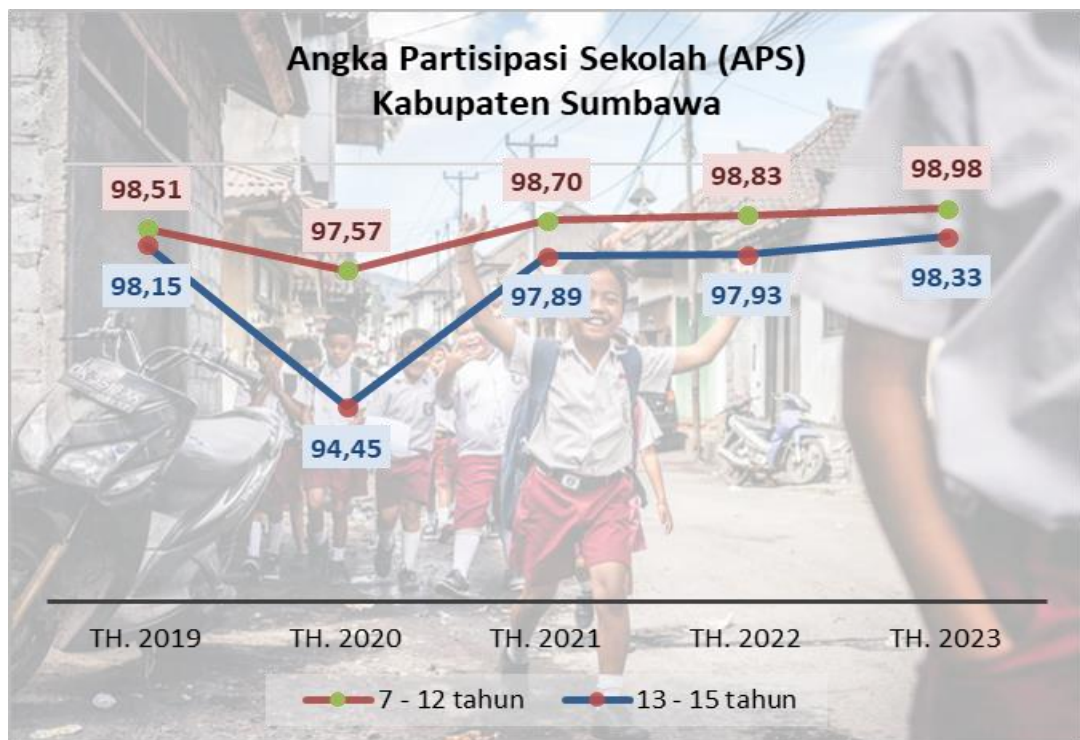
1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah digunakan untuk melihat seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan yang ada. Dalam konteks ini, partisipasi merujuk pada kehadiran dan partisipasi aktif dalam proses pendidikan. Meningkatnya

angka tingkat partisipasi sekolah berarti menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya kelompok umur tertentu yang sedang bersekolah, tanpa memperhatikan jenjang pendidikan yang sedang dijalani. APS merupakan indikator yang digunakan sebagai petunjuk keberhasilan program wajib belajar. Sebagai standar, program wajib belajar dikatakan berhasil jika nilai APS umur 7-12 tahun lebih dari 95 persen dan umur APS 13-15 tahun lebih dari 70%.

Berdasarkan data APS yang dikutip dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sumbawa, dalam 5 tahun terakhir (2019 – 2023) APS umur 7-12 tahun di Kabupaten Sumbawa selalu berada di atas 95% atau berkisar dari 97,57% sampai 98,98% dan untuk APS umur 13-15 tahun berkisar antara 94,45% hingga 98,33%. Gambar di bawah menunjukkan bahwa program wajib belajar di Kabupaten Sumbawa dapat dikatakan berhasil dalam 5 tahun terakhir (2019-2023).



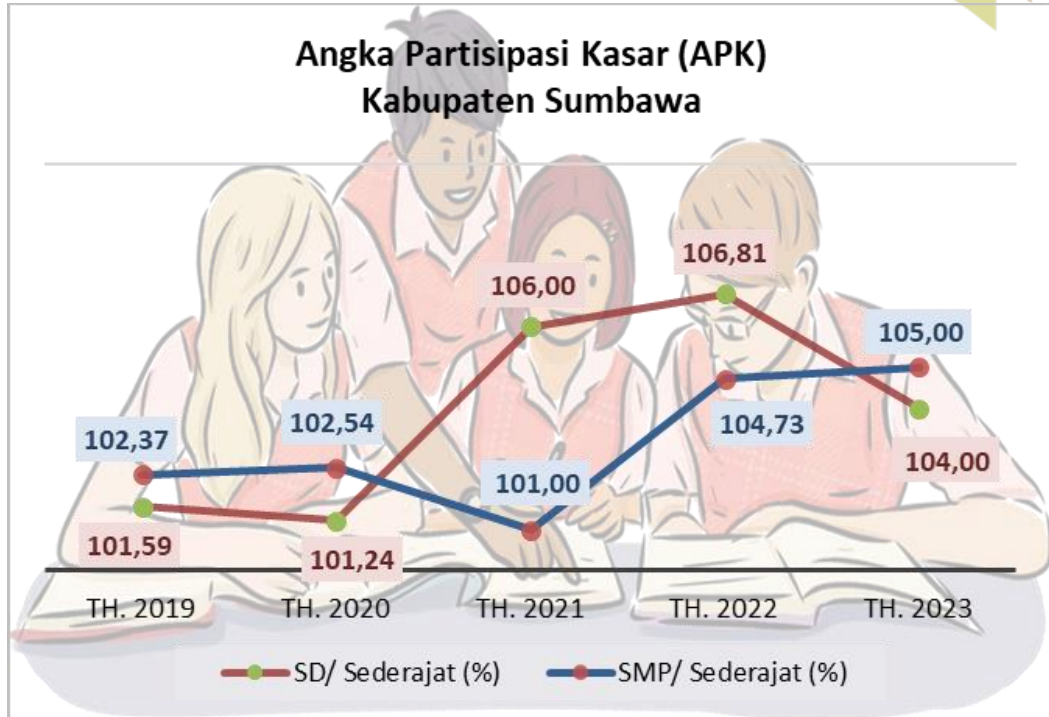
Gambar 3. 8 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 - 2023
Sumber Data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sumbawa

Namun, hal yang harus diperhatikan dari gambar di atas adalah kenyataan bahwa semakin tingginya jenjang pendidikan maka semakin rendahnya nilai APS. Hal ini mengindikasikan masih rendahnya kemauan anak usia sekolah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Faktor ketersediaan sarana dan fasilitas Pendidikan hingga faktor ekonomi serta keadaan sosial masyarakat menjadi penyebab dari fenomena ini.

2. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SMP, SMA dan sebagainya) dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui persentase anak usia sekolah yang sebenarnya terdaftar atau mengikuti pendidikan pada tingkat tertentu, tanpa mempertimbangkan tingkat kelas atau tahun ajaran tertentu.

Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Nilai APK bisa lebih besar dari 100% karena terdapat murid yang berusia di luar usia resmi sekolah, terletak di daerah kota, atau terletak pada daerah perbatasan. Angka Partisipasi Kasar selama 4 tahun terakhir pada semua jenjang pendidikan mengalami fluktuasi dalam pencapaiannya. Pada tahun 2023 pencapaian Angka Partisipasi Kasar tingkat SD berkisar di 104,00% sedangkan pada tingkat SMP mengalami peningkatan menjadi 105,00%. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat pada tingkat SD dan SMP yang cukup baik. Secara umum perkembangan APK pada semua jenjang pendidikan di Kabupaten Sumbawa dari Tahun 2019-2023 disajikan sebagai berikut.

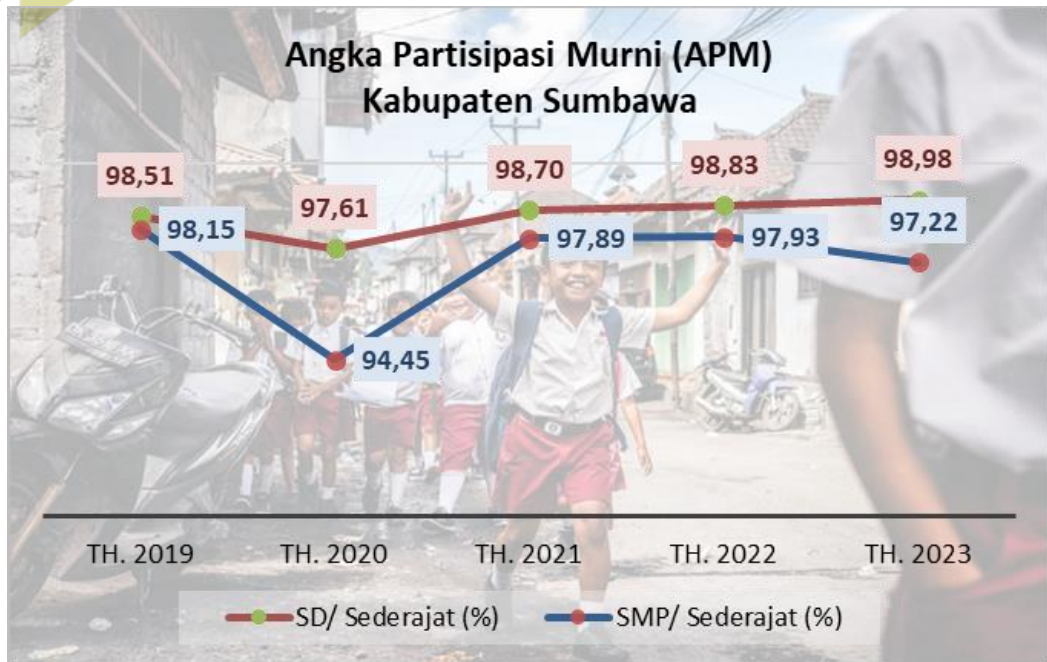


Gambar 3. 9 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023
Sumber Data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sumbawa

3. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) dapat menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Tepat waktu bersekolah sesuai umur sekolah adalah kunci utama yang digunakan untuk melihat angka partisipasi murni (APM). Semakin tinggi APM maka anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang tertentu juga semakin besar. APM juga merupakan indikator daya serap yang baik dari penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikannya.

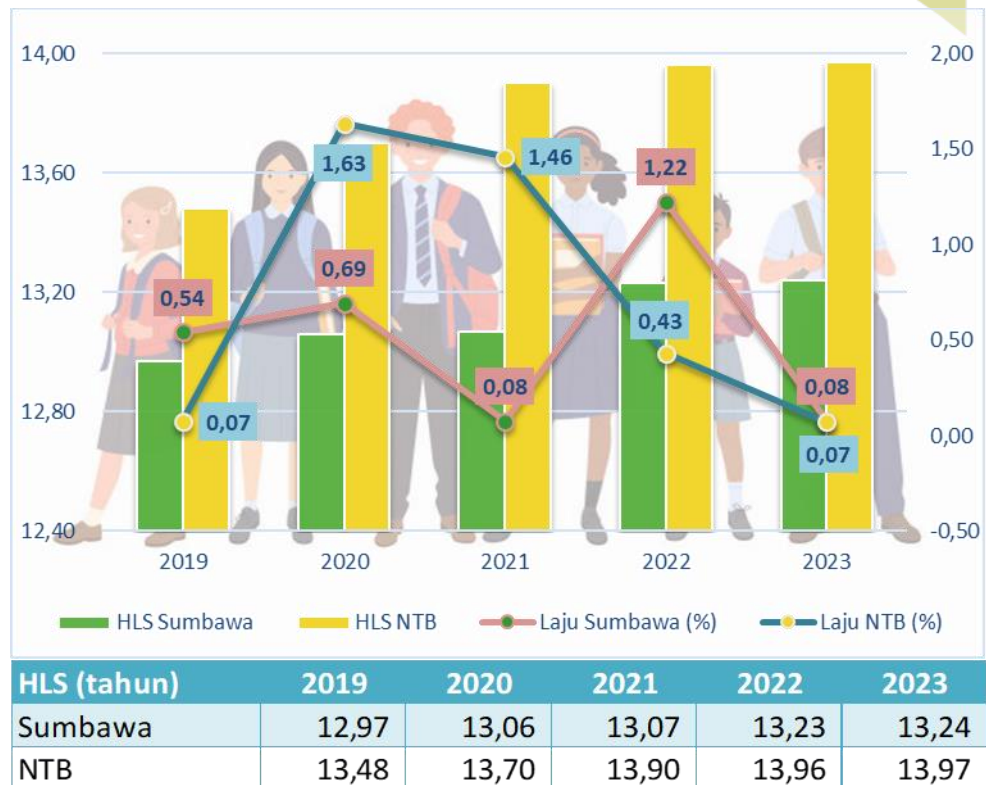
Pada tahun 2023 pencapaian Angka Partisipasi Murni Kabupaten Sumbawa tingkat SD meningkat pada 98,98% sebaliknya pada tingkat SMP menurun menjadi 97,22%. Nilai APM yang mencapai 90 persen ke atas menunjukkan sebagian besar anak yang bersekolah pada tingkat SD dan SMP di Kabupaten Sumbawa telah bersekolah tepat pada tingkatan usianya, sebagaimana berikut.



Gambar 3. 10 Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023
Sumber Data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sumbawa

4. Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) dan Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak usia 7 tahun keatas dimasa yang akan datang. Harapan Lama Sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang di suatu wilayah. Menurut perhitungan BPS, AHLS Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023 mencapai 13,24 tahun yang artinya anak usia 7 tahun ke atas pada tahun 2023 di Kabupaten Sumbawa diharapkan mampu mengenyam pendidikan formal sampai tingkat Diploma-II. sebagaimana tergambar sebagai berikut.

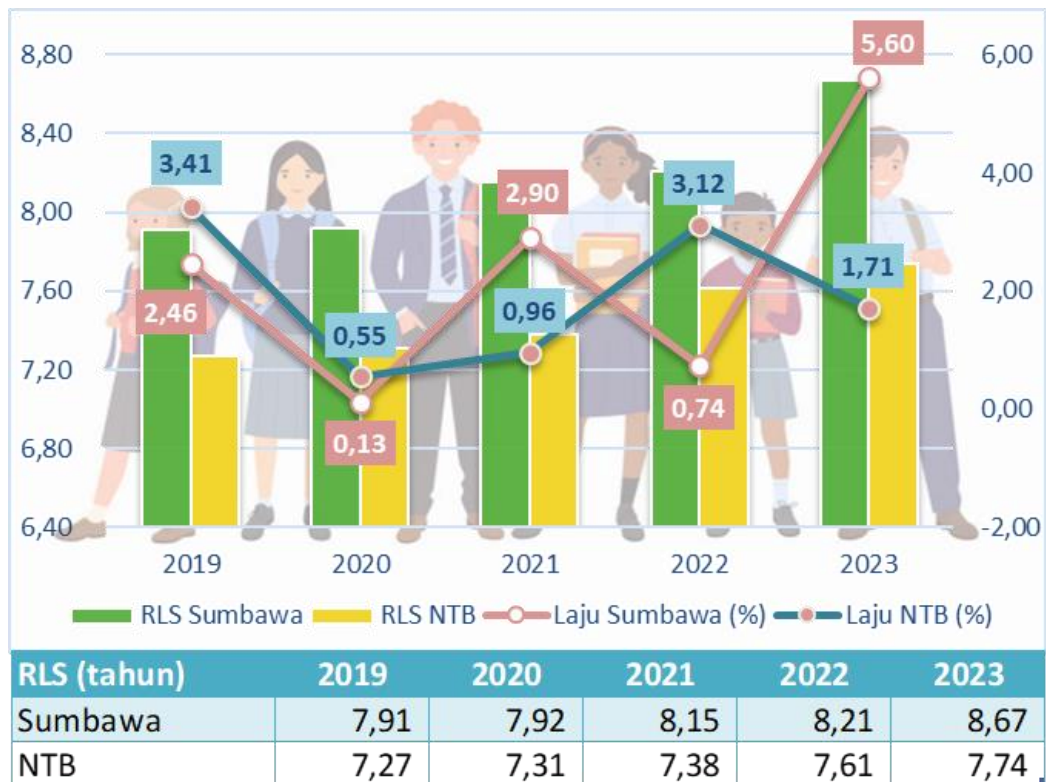


Gambar 3. 11 Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Laju Pertumbuhan HLS antara Kabupaten Sumbawa dengan Provinsi NTB Tahun 2019-2023
Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa

Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan untuk menempuh pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir.

Rata-rata lama sekolah (mean years of schooling) menunjukkan rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standar yang harus dijalani oleh seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan, misalnya tamat SD adalah 6 tahun, tamat SMP adalah 9 tahun dan seterusnya. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023 adalah 8,52 tahun angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pendidikan penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Sumbawa setara dengan kelas 8 pendidikan menengah, taraf ini masih jauh dari wajib belajar 9

tahun. Berdasarkan data, RLS Kabupaten Sumbawa lebih tinggi dari Provinsi NTB, sebagaimana tergambar sebagai berikut.



Gambar 3. 12 Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Laju Pertumbuhan RLS antara Kabupaten Sumbawa dengan Provinsi NTB Tahun 2019-2023
Sumber Data: Indikator Strategis Statistik Sosial NTB

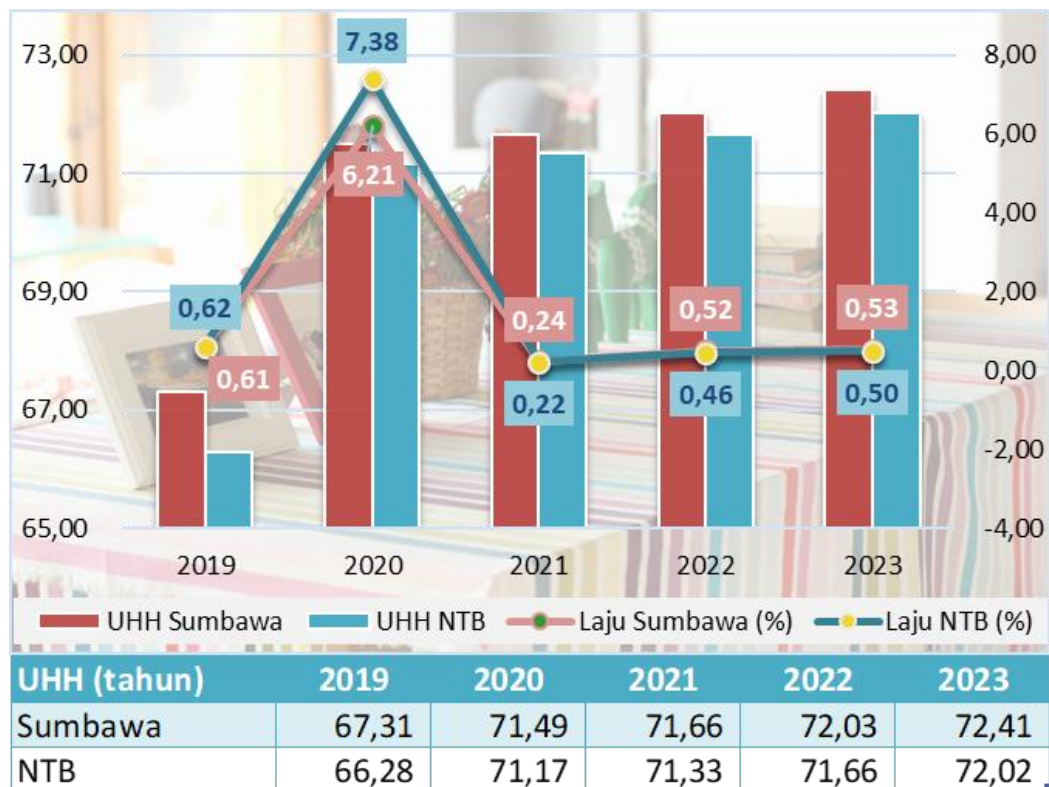
3.3. Kesehatan

1. Angka Harapan Hidup

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Sumbawa diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, karena pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi hak dasar rakyat, yaitu hak dasar untuk memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan juga harus dipandang sebagai suatu investasi dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu terlihat dari peningkatan pada dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diwakili oleh indikator Umur Harapan Hidup, dimana Usia Harapan Hidup

(UHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan UHH yaitu dengan menekan angka kematian ibu dan bayi serta memperhatikan kesehatan masyarakat secara umum. Selain itu, dengan meningkatkan kualitas hidup penduduk dengan menambah fasilitas dan tenaga kesehatan. Keberhasilan Pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk mengalami peningkatan dalam periode tahun 2020-2023, yakni dari 71,49 Tahun menjadi 72,41 Tahun yang artinya penduduk Sumbawa yang lahir ditahun 2023 memiliki harapan untuk hidup hingga umur 72 tahun 41 bulan, sebagaimana tergambar sebagai berikut.



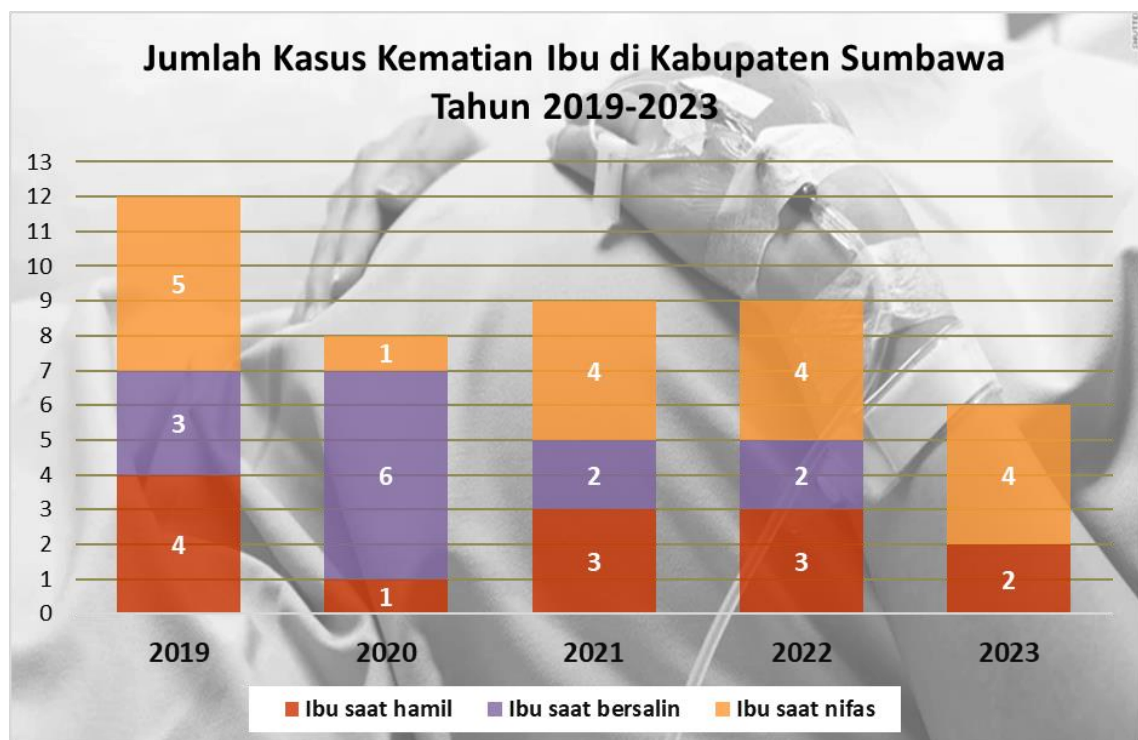
Gambar 3. 13 Perkembangan Angka (Tahun) dan Laju (%) Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Sumbawa dan Provinsi NTB Tahun 2019-2023

Sumber Data: Indikator Strategis Statistik Sosial NTB

2. Angka Kematian Ibu dan Anak

Angka Kematian Ibu

Merujuk pada definisi BPS Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2023, ditemukan 6 kasus kematian ibu di Kabupaten Sumbawa, jumlah ini terus menurun selama 3 tahun berturut-turut. Adapun perkembangan jumlah kasus kematian ibu dilaporkan pada tahun 2019 hingga 2023 adalah sebagai berikut:



Gambar 3. 14 Jumlah Kasus Kematian Ibu Tahun 2019 – 2023
Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Sumbawa

Untuk mendapatkan angka kematian ibu di Kab. Sumbawa tahun 2023 dibutuhkan angka lahir hidup. Angka lahir hidup adalah jumlah kelahiran bayi di suatu populasi tanpa memperhitungkan lamanya di dalam kandungan, dimana bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan, misal: bernafas, ada denyut jantung atau gerakan otot. Berdasarkan data

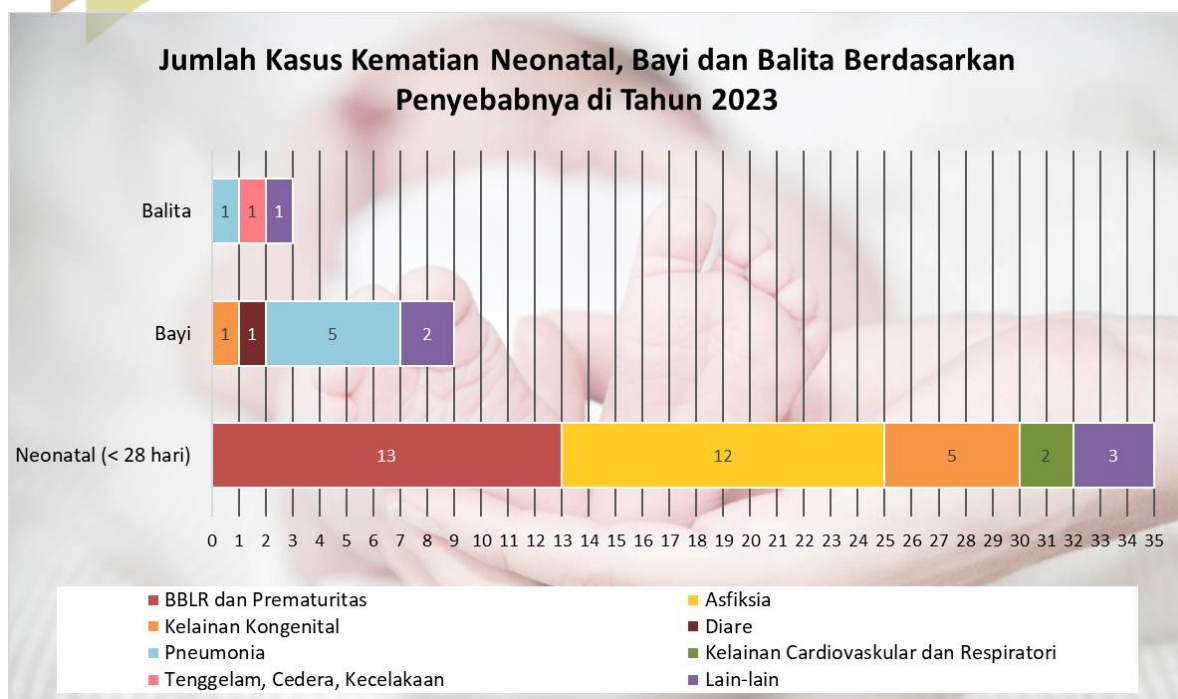


Bidang Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023 jumlah kelahiran hidup di Kabupaten Sumbawa adalah 7.767 jiwa, maka diperoleh **Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Sumbawa tahun 2023 adalah 77,24 \approx 77 per 100.000 kelahiran hidup.**

Angka Kematian Bayi dan Balita

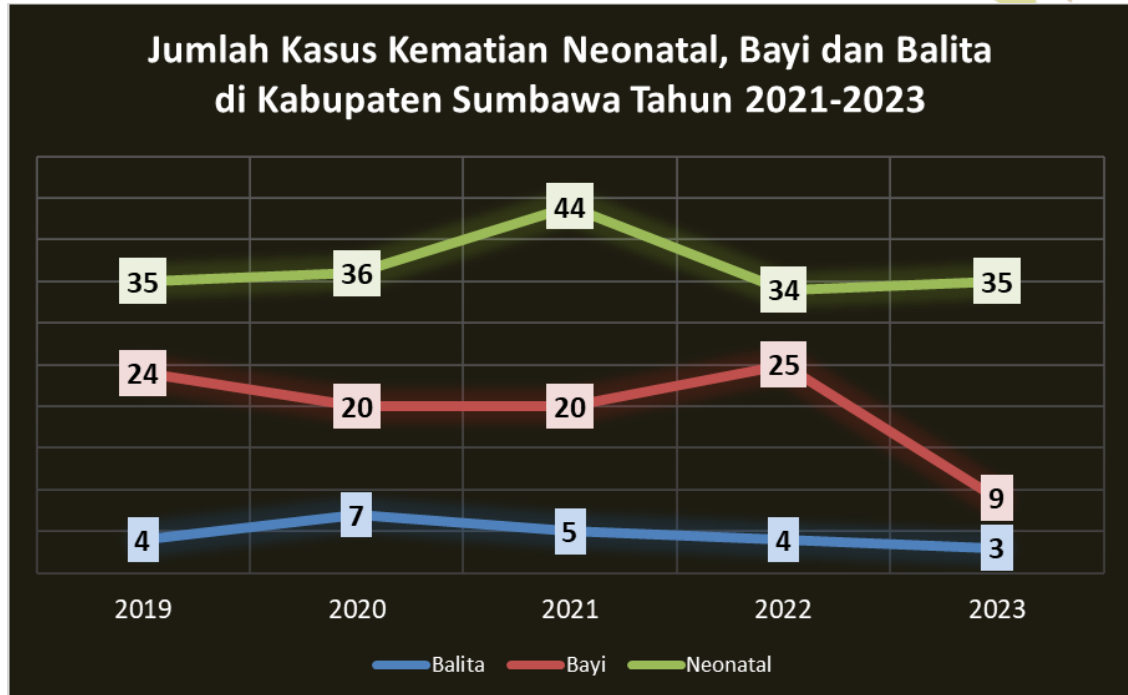
Angka Kematian Bayi menunjukkan jumlah bayi meninggal dalam usia kurang satu tahun tiap 1.000 kelahiran hidup dalam kurun satu tahun. Data yang kami sajikan saat ini terdiri dari angka kematian bayi baru lahir (neonatus), angka kematian bayi dan angka kematian balita. Neonatus didefinisikan bayi berumur kurang dari 28 hari, sedangkan Bayi atau post neonatus adalah bayi yang berumur 28 hari hingga 11 bulan dan Balita diartikan sebagai anak yang berumur 12 bulan hingga 5 tahun.

Berikut ditampilkan jumlah kasus kematian pada neonatal, bayi dan balita beserta penyebabnya di tahun 2023. Penyebab kematian neonatal terbanyak adalah Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) dan prematuritas sebanyak 13 kasus. Sedangkan pada usia bayi dan balita pneumonia menjadi ancaman yang serius dan dapat menyebabkan kematian pada usia ini. Pneumonia menyebabkan 5 kasus kematian bayi dan 1 kasus kematian balita, seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar 3. 15 Jumlah Kasus Kematian Bayi baru Lahir (Neonatus), Bayi (28 hari – 11 bulan), Balita dan penyebabnya di tahun 2023
Sumber data: Dinas Kesehatan Kab. Sumbawa

Tren kasus kematian Neonatal, Bayi dan Balita di Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 memperlihatkan bahwa kematian neonatal, bayi dan balita untuk 5 tahun terakhir di Kabupaten Sumbawa menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2023 adanya penurunan kasus kematian Bayi dan kasus kematian Balita, sementara jumlah kasus kematian Neonatal tidak berbeda jauh dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data di bawah ini maka diperoleh **Angka Kematian Neonatal, Bayi dan Balita di Kabupaten Sumbawa tahun 2023 masing-masing 4,50 per 1.000 kelahiran hidup, 1,15 per 1.000 kelahiran hidup dan 0,38 per 1.000 kelahiran hidup.**



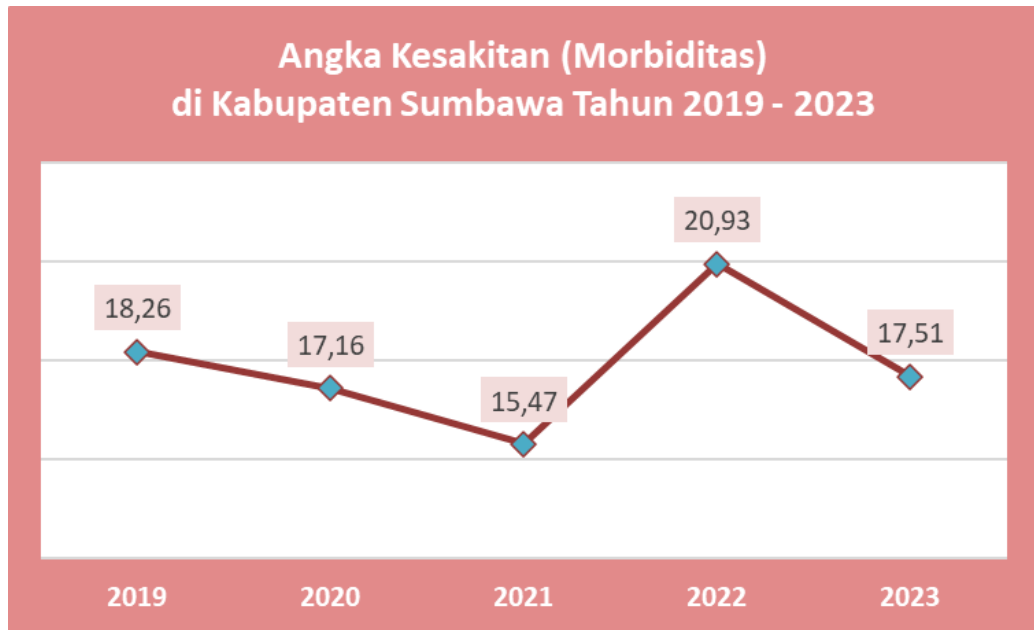
Gambar 3. 16 Perbandingan Jumlah Kematian Neonatal, Bayi dan Balita di Kab Sumbawa Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Sumbawa

Meningkatkan angka kelahiran hidup dan menurunkan angka kematian bayi dan balita merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat. Berbagai intervensi diperlukan, mulai dari meningkatkan akses ke perawatan prenatal dan postnatal, hingga memberikan edukasi kepada ibu tentang pentingnya nutrisi dan perawatan bayi. Program-program imunisasi dan pengawasan kesehatan juga memainkan peran krusial dalam mengurangi risiko kematian bayi.

3. Keluhan Kesehatan

Keluhan kesehatan yang dirasakan oleh seseorang menunjukkan orang tersebut mempunyai gangguan kesehatan atau kejiwaan. Keluhan kesehatan dapat disebabkan gangguan atau penyakit yang sering dialami, seperti panas, batuk, pilek, diare, sakit kepala, maupun karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun dalam sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), karena kecelakaan, kriminalitas, atau keluhan kesehatan lainnya. Angka kesakitan adalah persentase penduduk yang

mengalami keluhan kesehatan dan merasa terganggu dalam aktivitas sehari-hari, sehingga tidak dapat melakukan kegiatan secara normal seperti bekerja, sekolah, atau kegiatan sehari-hari lainnya sebagaimana biasanya. Tingginya angka kesakitan ini dapat mengindikasikan rendahnya derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah tersebut.



Gambar 3. 17 Perkembangan Angka kesakitan Kabupaten Sumbawa tahun 2019-2023
Sumber data: Susenas Maret 2019-2023

Angka kesakitan Kabupaten Sumbawa terus mengalami penurunan dalam kondisi membaik dari tahun ke tahun yang mencapai 15,47% pada tahun 2021 dari 17,16% pada tahun 2020 namun naik menjadi 20,93% pada tahun 2022 dan kembali menurun di angka 17,51% pada tahun 2023. hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sumbawa untuk terus menerapkan pola hidup sehat serta menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya agar terhindar dari penyakit-penyakit menular maupun tidak menular.

Adapun 10 penyakit terbanyak yang diderita masyarakat Kabupaten Sumbawa berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa antara lain,

- Hipertensi
- Luka ringan
- Rinitis
- Faringitis

- Gastritis
- Gatal-Gatal
- Diare
- Diabetes Melitus non komplikasi
- Influenza/ Batuk pilek biasa
- Hipertensi

4. Sumber Daya Kesehatan

Jumlah fasilitas kesehatan kian bertambah dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2019, Poliklinik Muhammadiyah berubah fungsi menjadi Rumah Sakit Muhammadiyah. Dengan demikian, di Kabupaten Sumbawa memiliki tiga fasilitas Rumah Sakit, dua diantaranya milik pemerintah dan sisanya milik swasta. Peningkatan status tersebut juga disertai dengan peningkatan fasilitas seperti perbanyak ruang rawat inap serta penambahan poli.

Tabel 3. 4 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2022-2023

Fasilitas Kesehatan	2022	2023
Rumah Sakit	3	3
Puskesmas	26	26
Posyandu	742	751
Klinik Pratama	8	9
Total	779	789

Sumber Data: Dinas Kesehatan Kab. Sumbawa

Jumlah tenaga medis harus disesuaikan dengan penambahan jumlah penduduk yang ada. Pada Tahun 2023, terdapat sebanyak 127 dokter umum. Perawat dan bidan merupakan dua terbanyak, yaitu 610 perawat dan 414 bidan. Sebagian besar tenaga kesehatan ditempatkan di unit kerja Puskesmas, dimana tersebar di tiap kecamatan di Kabupaten Sumbawa.

Tabel 3. 5 Jumlah Tenaga Kesehatan yang Bekerja di Unit Kesehatan Kabupaten Sumbawa Tahun 2023

Tenaga Kesehatan	26 Puskesmas	RSUD	RSUP	RS PKU Muhammadiyah	Total	Rasio tenaga kesehatan (per 100.000 penduduk)

Tenaga Kesehatan	26 Puskesmas	RSUD	RSUP	RS PKU Muha- mmadi -yah	Total	Rasio tenaga kesehatan (per 100.000 penduduk)
Dokter Spesialis	0	24	11	10	45	8,50
Dokter Umum	61	19	26	25	131	24,74
Dokter Gigi	26	4	2	1	33	6,23
Dokter Gigi Spesialis	0	4	0	2	6	1,13
Perawat	851	253	127	33	1.264	238,72
Bidan	829	62	121	12	1.024	193,39
Kesehatan Masyarakat	116	0	4	2	122	23,04
Kesehatan Lingkungan	43	6	1	1	51	9,63
Gizi	75	14	6	0	95	17,94
Ahli Teknologi Laboratorium Medik	64	23	34	0	121	22,85
Tenaga Teknik Biomedik Lainnya	0	21	4	0	25	4,72
Keterampilan Fisik	2	12	0	0	14	2,64
Keteknisan Medis	8	11	0	0	19	3,59
Tenaga Teknis Kefarmasian	33	16	5	9	63	11,89
Apoteker	27	12	5	2	46	8,68
Total	2.135	481	346	97	3.059	577,72

Sumber Data: Dinas Kesehatan Kab. Sumbawa (diolah)

Derajat kesehatan penduduk salah satunya dipengaruhi oleh keberadaan sarana kesehatan yang memadai seperti rumah sakit dan puskesmas induk serta didukung dengan keberadaan puskesmas pembantu dan puskesmas keliling. Untuk melayani kesehatan penduduk yang berada di Kabupaten Sumbawa selain Rumah Sakit Umum Daerah, juga didukung oleh keberadaan puskesmas yang menyebar di semua kecamatan. Adapun rasio sarana kesehatan seperti Rumah Sakit, puskesmas, posyandu, dan poliklinik terhadap jumlah penduduk sebesar 671 penduduk pada tahun 2023, sedangkan secara kewilayahan, posisi Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023 dalam pelayanan kesehatan menunjukkan bahwa perbandingan 1 sarana kesehatan seperti rumah

sakit, puskesmas, posyandu, poliklinik mampu melayani wilayah seluas 8,42 km², hal ini terinci seperti pada tabel berikut.

Tabel 3. 6 Aksesibilitas Sarana Kesehatan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Sarana Kesehatan (RS, Puskesmas, Posyandu, Klinik pratama)	Rasio penduduk terhadap sarana kesehatan (jiwa/sarana kesehatan)	Rasio Luas Wilayah terhadap sarana kesehatan (km ² /sarana kesehatan)
1	Lunyuk	513,74	22.939	36	637	14,27
2	Orong Telu	465,97	5.645	15	376	31,06
3	Alas	123,04	34.201	34	1.006	3,62
4	Alas Barat	168,88	26.939	34	792	4,97
5	Buer	137,01	17.696	24	737	5,71
6	Utan	155,42	37.338	56	667	2,78
7	Rhee	230,82	9.638	22	438	10,49
8	Batulanteh	391,4	12.093	21	576	18,64
9	Sumbawa	44,83	63.362	94	674	0,48
10	Labuhan Badas	435,89	36.710	26	1.412	16,77
11	Unter Iwes	82,38	24.606	37	665	2,23
12	Moyohilir	186,79	29.297	42	698	4,45
13	Moyo Utara	90,8	25.648	23	1.115	13,56
14	Moyohulu	311,96	12.046	38	317	2,39
15	Ropang	44,48	6.374	9	708	49,39
16	Lenangguar	504,32	8.265	16	517	31,52
17	Lantung	167,45	4.187	7	598	23,92
18	Lape	204,43	20.740	35	593	5,84
19	Lopok	155,59	22.208	36	617	4,32
20	Plampang	418,69	35.870	44	815	9,52
21	Labangka	243,08	14.030	49	286	4,96
22	Maronge	274,75	12.474	17	734	16,16
23	Empang	558,55	27.124	37	733	15,10
24	Tarano	333,71	20.057	37	542	9,02

Sumber Data: Dinas Kesehatan Kab. Sumbawa (diolah)

3.4. Kemiskinan

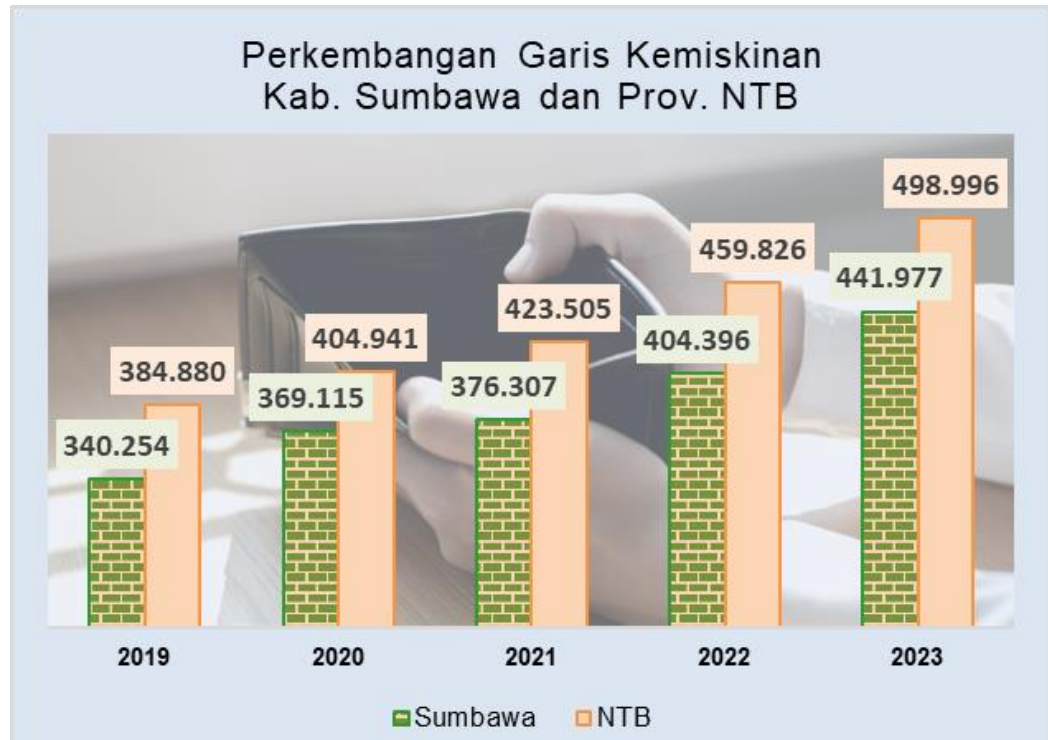
Kemiskinan merupakan ketidakmampuan penduduk dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula $(100 - \text{angka kemiskinan})$. Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

1. Tingkat Kemiskinan dan Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan adalah ambang batas pendapatan yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan di suatu daerah atau wilayah. Garis Kemiskinan, terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori perkapita perhari. GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Garis kemiskinan di Kabupaten Sumbawa menunjukkan tren meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebagaimana tergambar sebagai berikut.

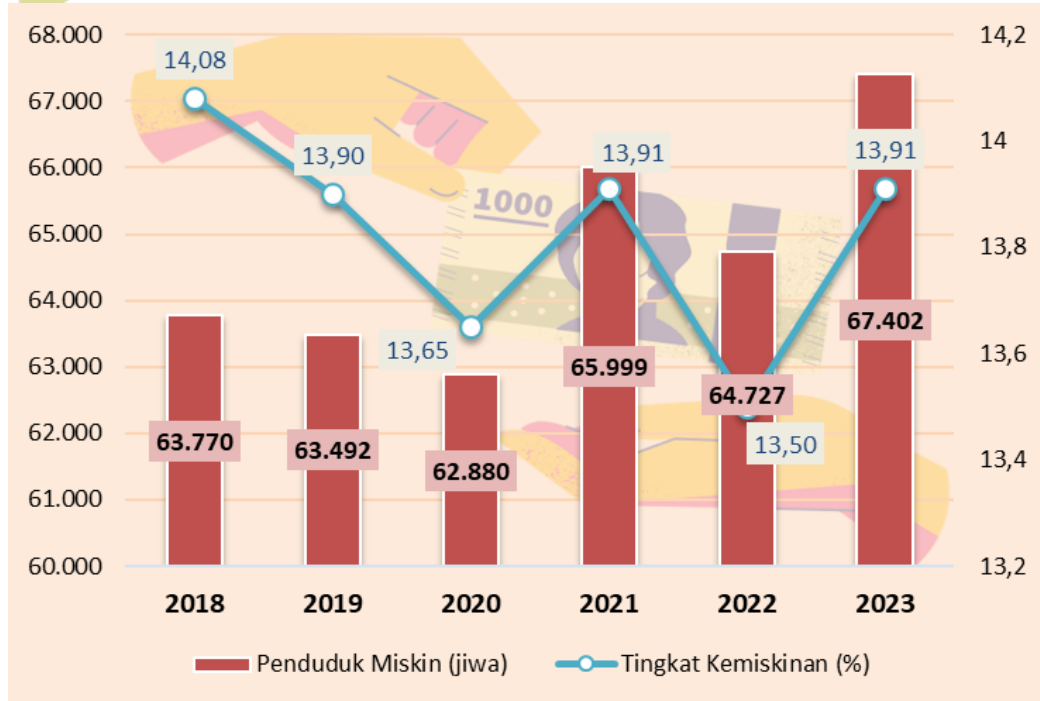
Garis kemiskinan Kabupaten Sumbawa selama 5 tahun terakhir (2019-2023) terus mengalami kenaikan dari Rp.340.254,- menjadi Rp.441.977,- pada akhir tahun 2023, begitu pula garis kemiskinan provinsi NTB berkembang dari Rp.384.880,- hingga Rp.498.996,-. Peningkatan garis kemiskinan seringkali merupakan hasil dari beberapa faktor yang saling terkait seperti kenaikan harga barang dan jasa, tingkat pengangguran, ketidaksetaraan ekonomi dan lainnya. Oleh karena itu,

solusi untuk mengatasi kemiskinan sering melibatkan kombinasi tindakan ekonomi, kebijakan sosial, dan pendekatan yang berkelanjutan untuk meminimalkan risiko kemiskinan dan mempromosikan inklusi sosial dan ekonomi.



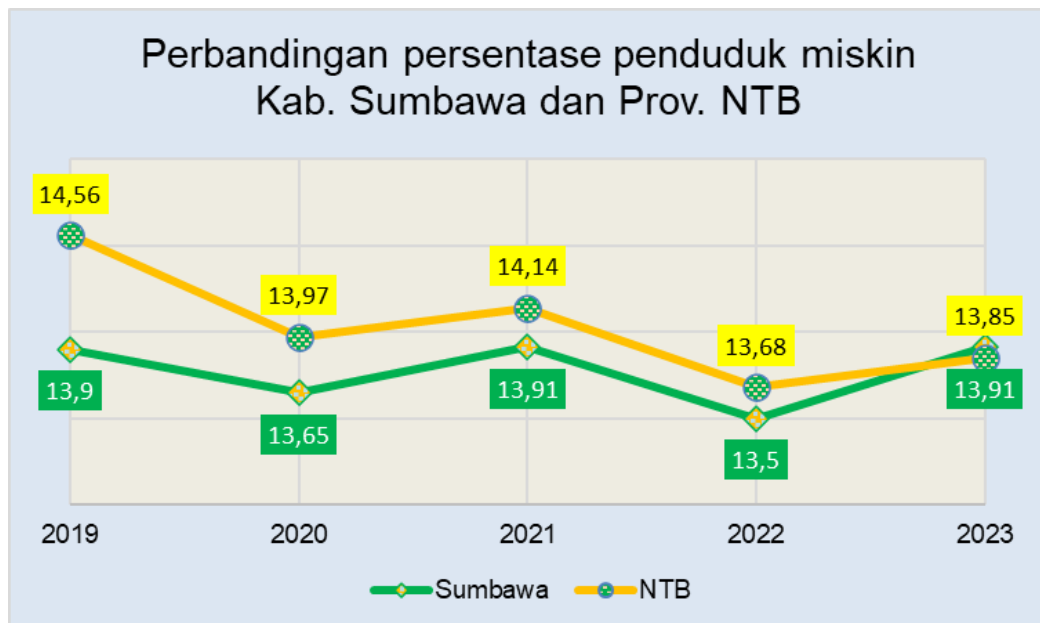
Gambar 3. 18 Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 – 2023
Sumber Data: Indikator Strategis Statistik Sosial Provinsi NTB 2019-2023

Tingkat kemiskinan ditentukan oleh besarnya garis kemiskinan sedangkan penduduk miskin adalah penduduk yang berpenghasilan di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan, di Kabupaten Sumbawa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2019-2023) berfluktuasi, akan tetapi terjadi penurunan rata-rata sebesar 0,17 poin, yakni dari 13,90% pada tahun 2019 menurun menjadi 13,65% pada tahun 2020 dan kembali meningkat di tahun 2021 sebesar 13,91% sebagai dampak adanya pandemi covid 19 yang membatasi aktivitas masyarakat sehari-hari, sehingga berpengaruh terhadap menurunnya pendapatan masyarakat itu sendiri. Di Tahun 2022 kembali mengalami penurunan sebagai dampak pemulihan ekonomi pasca Covid-19 dan di tahun 2023 kembali meningkat menjadi 13,91% sebagai dampak adanya inflasi, sebagaimana tergambar sebagai berikut.



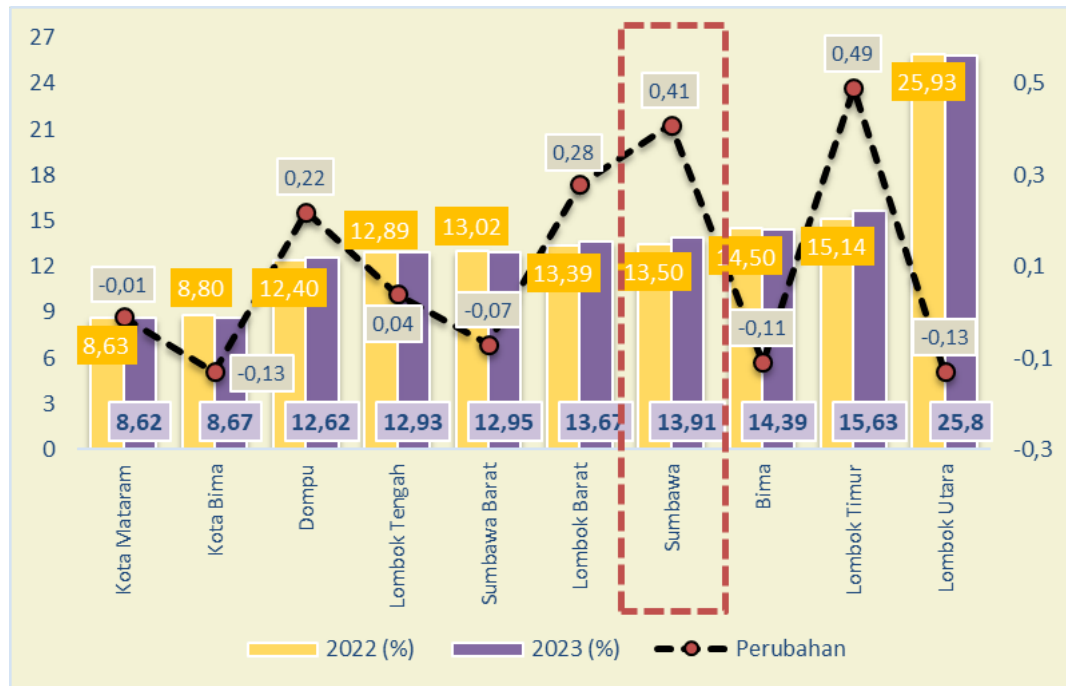
Gambar 3. 19 Jumlah dan Tingkat Kemiskinan di Kab. Sumbawa Tahun 2019-2023
Sumber Data: Indikator Strategis Statistik Sosial Provinsi NTB 2019-2023

Tingkat kemiskinan Kabupaten Sumbawa kembali mengalami peningkatan 0,41% di tahun 2023 dari tahun sebelumnya. Angka ini cenderung fluktuatif selama lima tahun terakhir namun tetap menunjukkan tren menurun dengan rata-rata laju penurunan dalam rentang waktu tahun 2019-2023 sebesar 0,03%.



Gambar 3. 20 Tingkat Kemiskinan Kab. Sumbawa dan Provinsi NTB Tahun 2019-2023
Sumber Data: Indikator Strategis Statistik Sosial Provinsi NTB 2019-2023

Tingkat kemiskinan di Provinsi NTB memperlihatkan terjadinya peningkatan di 5 Kabupaten (Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa dan Dompu) sementara 5 lainnya mengalami penurunan (Bima, Sumbawa Barat, Lombok Utara, Kota Mataram dan Kota Bima), sebagaimana tergambar sebagai berikut.



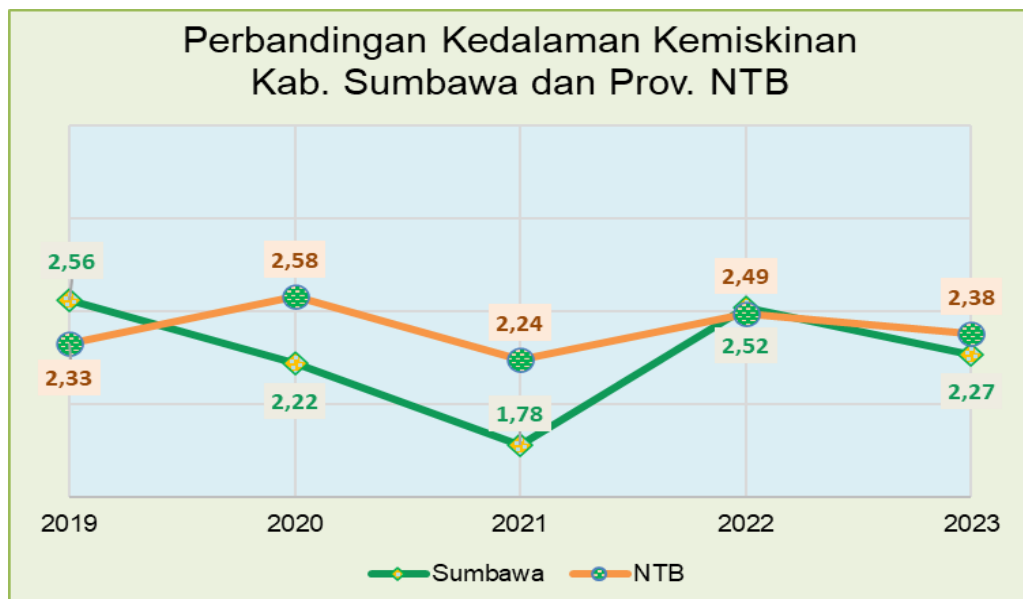
Gambar 3. 21 Tingkat Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 – 2023
Sumber Data: Indikator Strategis Statistik Sosial Provinsi NTB 2019-2023

2. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

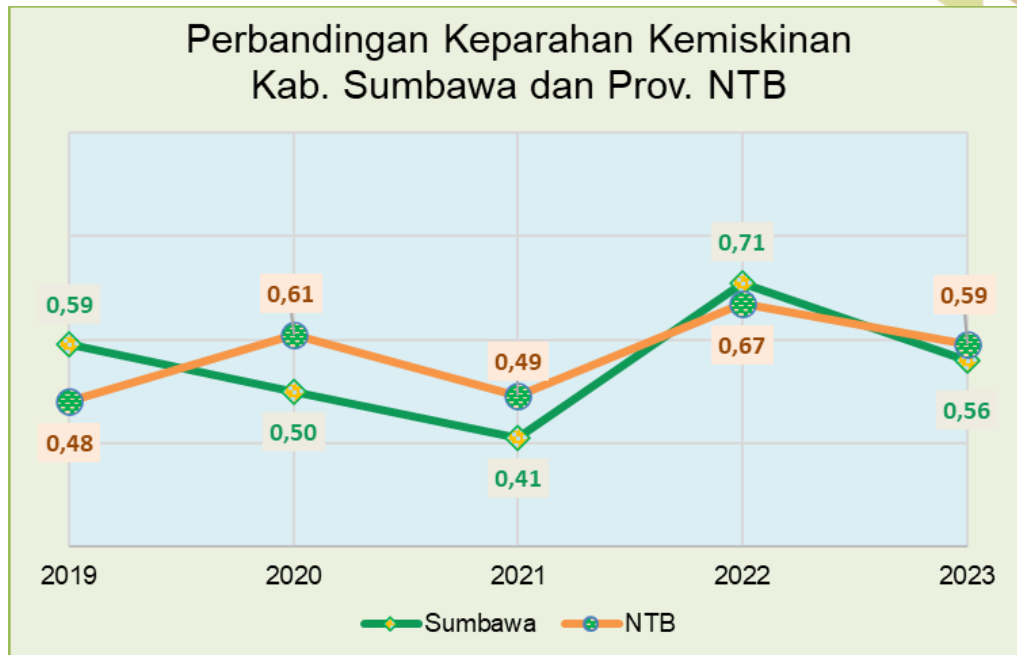
Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Sumbawa sejak tahun 2019 hingga tahun 2021 mengalami penurunan dari 2,56 menjadi 1,78, akan tetapi di tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 2,52 dan kembali menurun di tahun 2023 sebesar 2,27. Bila dibandingkan dengan indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi NTB dalam 4 (empat tahun) terakhir, maka indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Sumbawa lebih baik, sebagaimana tergambar sebagai berikut.



Gambar 3. 22 Kedalaman Kemiskinan Kab. Sumbawa dan Provinsi NTB Tahun 2019-2023
Sumber Data: Indikator Strategis Statistik Sosial Provinsi NTB 2019-2023

Sementara, Indeks Keparahan Kemiskinan (Proverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Gambar 3.22 menampilkan perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabuptean Sumbawa dan Provinsi NTB tahun 2019-2023. Perkembangan indek keparahan kemiskinan Kabupaten Sumbawa terus menurun sampai dengan tahun 2021, akan tetapi meningkat di tahun 2022 dan kembali menurun menjadi 0,56 di tahun 2023 dibawah Provinsi NTB, sebagaimana tergambar sebagai berikut.



Gambar 3. 23 Keparahen Kemiskinan Kab. Sumbawa dan Provinsi NTB Tahun 2019-2023
Sumber Data: Indikator Strategis Statistik Sosial Provinsi NTB 2019-2023

Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sumbawa memerlukan upaya dan langkah taktis yang terpadu, dilakukan secara bertahap, terencana, menyeluruh, terukur dan berkesinambungan, serta menuntut keterlibatan semua pihak, baik penyelenggara pemerintahan daerah (pemerintah dan DPRD), dunia usaha, LSM, organisasi kemasyarakatan, maupun masyarakat miskin itu sendiri agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perbaikan kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Adapun rencana aksi penanggulangan kemiskinan secara garis besar dilakukan secara simultan antara meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengakses layanan dan pada saat yang bersamaan diupayakan menurunkan beban pengeluaran yang harus ditanggung masyarakat. Implementasi kebijakan ini antara lain melalui perluasan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin.

3.5. Ketenagakerjaan

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting bagi pembangunan ekonomi daerah, sehingga sektor ketenagakerjaan dipandang strategis menjadi salah satu cara untuk mengurangi angka pengangguran dan dapat memperkecil tingkat kemiskinan pada masyarakat. Penduduk yang dikategorikan sebagai penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas. Pada tahun 2023 jumlah penduduk usia kerja Kabupaten Sumbawa meningkat menjadi 398,06 ribu orang terdiri dari Angkatan Kerja sebanyak 283,29 ribu orang (bekerja: 275,38 ribu orang, pengangguran: 7,91 ribu orang) dan Bukan Angkatan Kerja sebanyak 114,77 ribu orang. Dengan kata lain, angkatan kerja terdiri dari penduduk usia produktif yang bekerja atau mempunyai pekerjaan tapi sementara tidak bekerja dan penduduk yang berstatus pengangguran. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja yaitu penduduk usia produktif yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lain selain rumah tangga.

Tabel di bawah menjelaskan rincian indikator ketenagakerjaan di Kabupaten Sumbawa dalam rentang tahun 2019-2023.

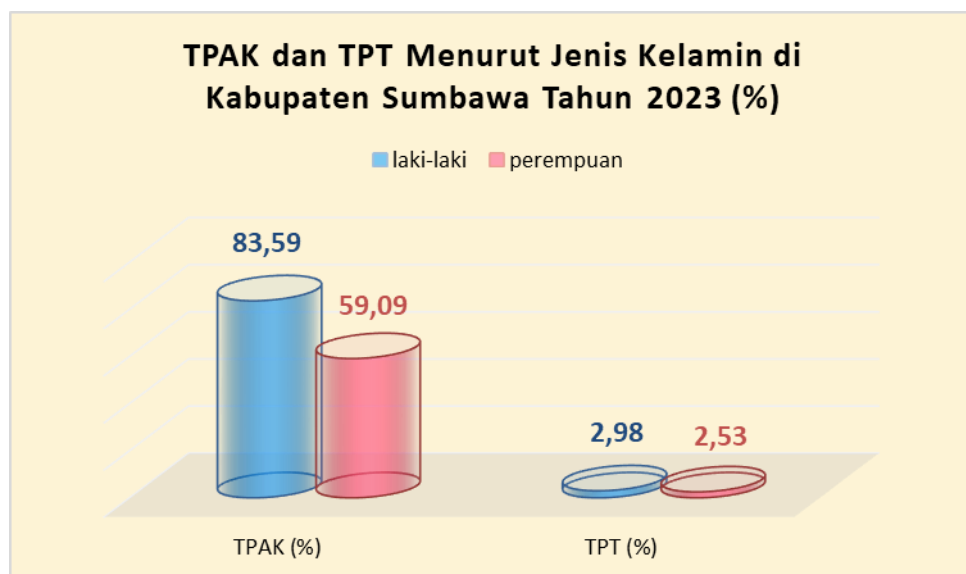
Tabel 3. 7 Indikator Ketenagakerjaan Tahun 2019-2023

Indikator Ketenagakerjaan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Keatas) (ribu jiwa)	328,47	347,47	352,43	357,33	398,05
Jumlah Penduduk Angkatan Kerja (ribu jiwa)	217,66	240,14	235,62	257,55	283,29
Jumlah Penduduk Bekerja (ribu jiwa)	210,92	230,51	227,63	252,11	275,38
Jumlah Penduduk Bukan Angkatan Kerja (ribu jiwa)	110,81	107,33	116,81	99,78	114,77
Jumlah Pengangguran (ribu jiwa)	6,74	9,63	7,99	5,44	7,91
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	66,26	69,11	66,86	72,08	71,17
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) (%)	-	-	-	97,89	97,17
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,1	4,01	3,39	2,11	2,79

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa
Catatan: hasil survei Sakernas Agustus 2021-2023

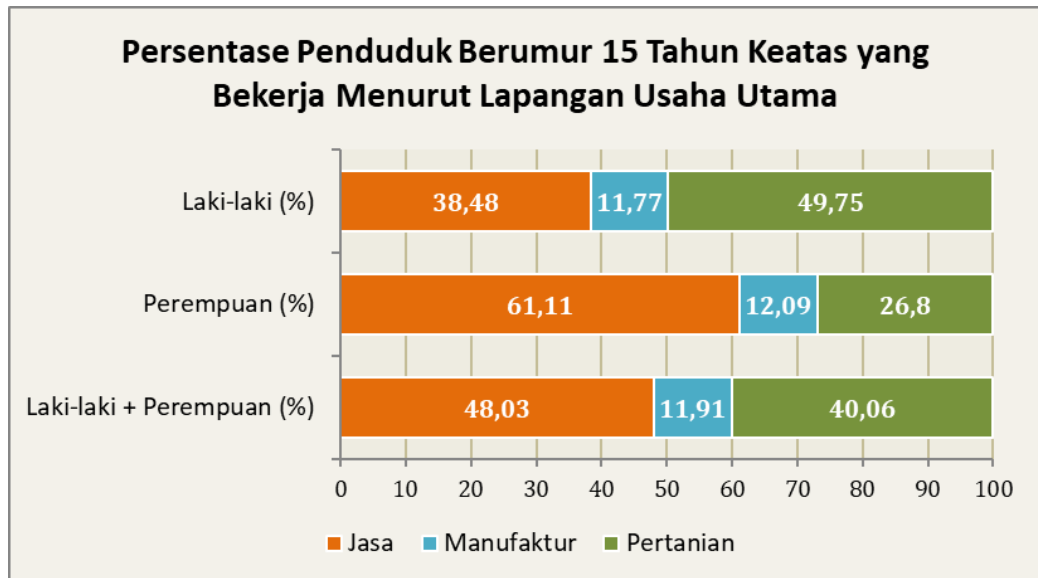
Untuk melihat besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi baik yang sedang bekerja atau mencari pekerjaan di suatu wilayah dapat dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian wilayah tersebut. TPAK Kabupaten Sumbawa tahun 2023 menurun menjadi 71,17%. Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meliputi penduduk usia produktif yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan pekerjaan atau yang tidak mencari pekerjaan karena putus asa. Termasuk juga yang telah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. TPT Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2023 sebesar 2,79%, mengalami peningkatan dibandingkan dengan TPT Tahun 2022 sebesar 0,68 poin.

TPAK perempuan hanya mencapai 59,09% atau lebih separuh dari TPAK laki - laki. Tingkat aktivitas pada perempuan jauh lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini dikarenakan perempuan pada usia produktif masih banyak yang memilih mengurus rumah tangga. Meskipun demikian TPT laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan hal ini searah dengan jumlah angkatan kerja laki-laki yang lebih banyak dibanding angkatan kerja perempuan.



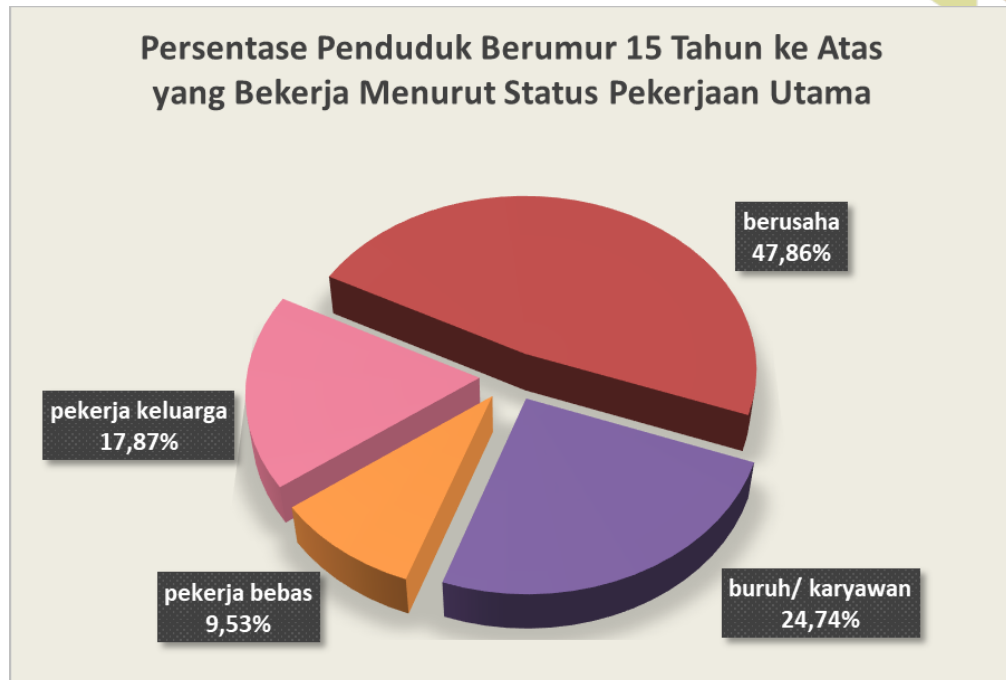
Gambar 3. 24 TPAK dan TPT Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 (%)
Sumber Data: Statistik Ketenagakerjaan Kab. Sumbawa Tahun 2023

Jika dilihat menurut lapangan usaha, penyerapan tenaga kerja terbesar telah bergeser dari sektor pertanian ke sektor jasa dengan persentase sebesar 48,03% dan disusul lapangan usaha bidang pertanian dan manufaktur masing-masing 40,06% dan 11,91%. Baik sektor jasa dan manufaktur didominasi oleh tenaga kerja perempuan sementara sektor pertanian masih lebih banyak menyerap tenaga kerja laki-laki.



Gambar 3. 25 Persentase Penduduk usia kerja yang bekerja menurut lapangan usaha dan jenis kelamin Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 (%)
Sumber Data: Statistik Ketenagakerjaan Kab. Sumbawa Tahun 2023

Selanjutnya jika dilihat menurut status pekerjaan utama, pekerja dengan status berusaha mencapai angka 47,86%. Kemudian diikuti oleh buruh/karyawan sebesar 24,74%. Untuk pekerja keluarga dan pekerja bebas masing-masing sebesar 17,87% dan 9,53% baik di sektor pertanian maupun non pertanian. Porsi masyarakat yang bekerja sendiri atau memiliki usaha sendiri menempati urutan pertama mengingat pada masa pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati saat ini digalakkannya kegiatan UMKM untuk mendukung kemandirian finansial masyarakat. Berbagai upaya pemerintah Kabupaten Sumbawa dilakukan untuk mendukung keberlangsungan pegiat UMKM di Kabupaten Sumbawa salah satunya adalah dengan memfasilitasi dan menggratiskan biaya penerbitan sertifikasi halal dan label BPOM bagi pelaku usaha.

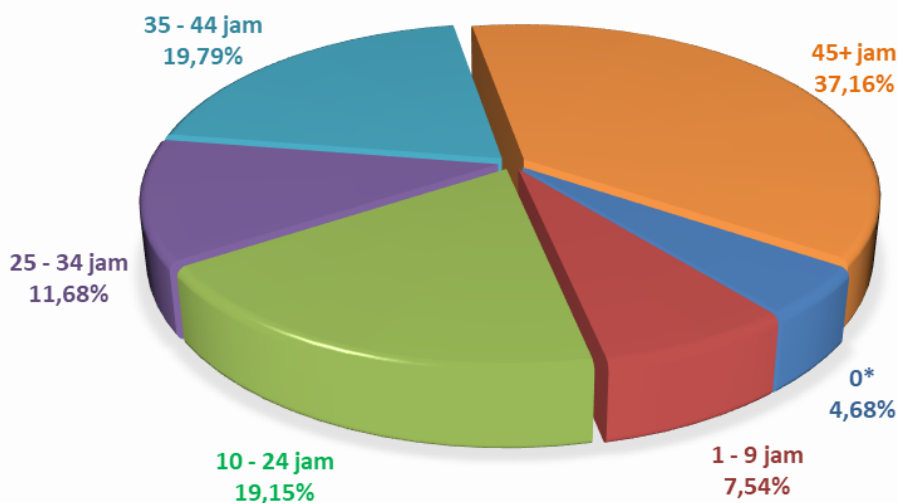


Gambar 3. 26 Persentase Penduduk usia kerja yang bekerja menurut status pekerjaan utama di Kabupaten Sumbawa tahun 2023 (%)

Sumber Data: Statistik Ketenagakerjaan Kab. Sumbawa Tahun 2023

Penduduk usia produktif yang bekerja dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah seluruh jam kerjanya selama seminggu. Jam kerja normal dalam seminggu adalah 35 jam. Kelompok yang jam kerjanya di bawah 35 jam akan dikategorikan menjadi setengah pengangguran. Lebih dari sepertiga total penduduk bekerja merupakan setengah pengangguran. Sebanyak 56,95% penduduk bekerja di atas jam normal yang terdiri dari 19,79% pada kelompok 35 - 44 jam per minggu dan 37,16% pada kelompok di atas 45 jam.

PERSENTASE PENDUDUK 15+ YANG BEKERJA MENURUT JAM KERJA DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023 (%)



Gambar 3. 27 Persentase penduduk usia kerja yang bekerja menurut jam kerja di Kabupaten Sumbawa tahun 2023 (%)

*) Sementara tidak bekerja

Sumber Data: Statistik Ketenagakerjaan Kab. Sumbawa Tahun 2023

Rata-rata jumlah jam kerja terbanyak pada penduduk yang bekerja telah bergeser dari sektor manufaktur ke sektor jasa. Pada tahun 2023 rata-rata jam bekerjanya mencapai 35 jam per minggu. Secara umum, rata - rata jam kerja perempuan lebih rendah dibandingkan laki - laki. Hal ini disebabkan karena perempuan terkadang bekerja hanya untuk mencari tambahan penghasilan rumah tangga, bukan yang utama juga karena sering sebagai pekerja keluarga.

Tabel 3. 8 Jumlah Jam Kerja Utama Penduduk Usia Kerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sumbawa Tahun 2023

Lapangan Usaha	Laki-laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
Pertanian	32	21	29
Manufaktur	33	30	31
Jasa	43	41	42
Total	36	34	35

Sumber Data: Statistik Ketenagakerjaan Kab. Sumbawa Tahun 2023

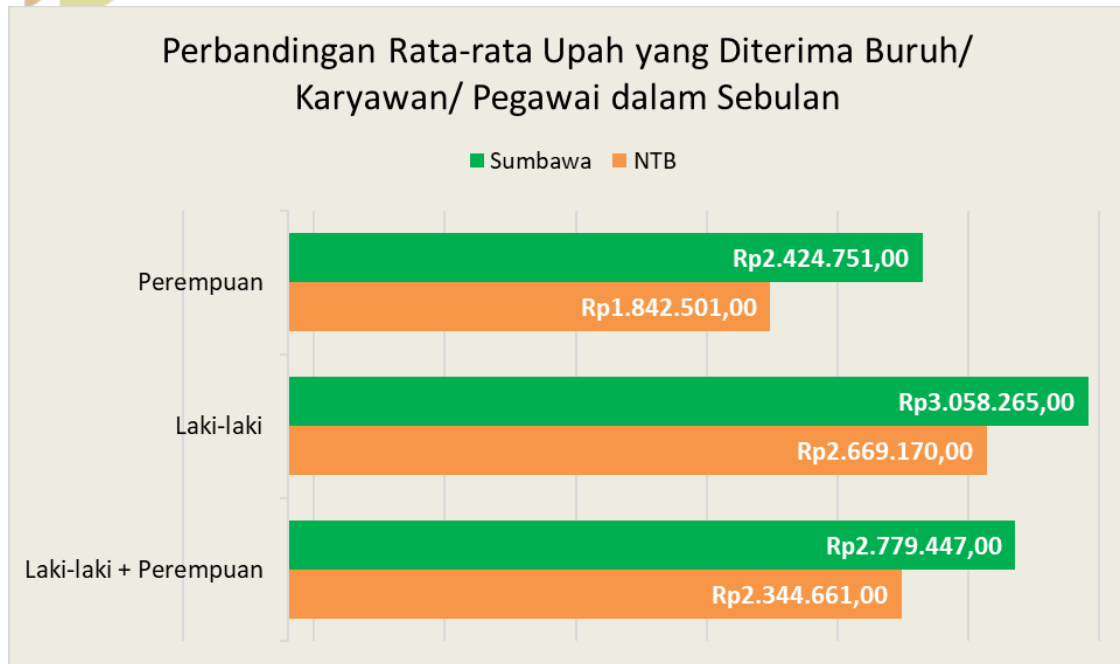
Peran perempuan yang juga mempunyai kewajiban mengurus rumah tangga, sehingga masuk akal jika terkadang lebih memilih bekerja dengan rentang waktu yang tidak terlalu panjang. Selama Tahun 2019-2023, terdapat peningkatan rata-rata jam kerja untuk penduduk berumur 15 tahun keatas. Pada Tahun 2019, rata-rata jam kerja selama 35,90 jam dalam seminggu. Rata-rata jam kerja mengalami peningkatan menjadi 37,64 jam dalam seminggu pada Tahun 2023.

Tabel 3. 9 Rata-rata Jam Kerja Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Untuk Seluruh Pekerjaan Selama Seminggu Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumbawa

Tahun	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
2019	35,84	36,00	35,90
2020	36,95	35,11	36,27
2021	38,02	37,13	37,70
2022	38,97	36,24	37,96
2023	39,01	35,78	37,64

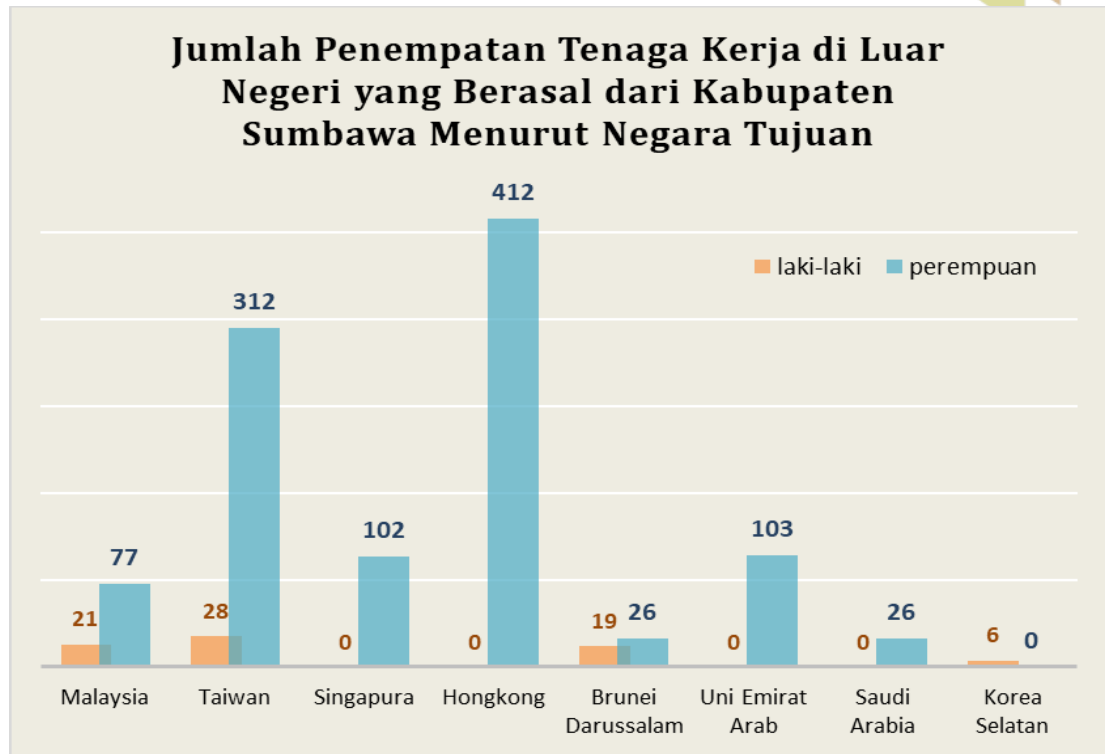
Sumber Data: Statistik Ketenagakerjaan Kab. Sumbawa Tahun 2023

Sektor usaha informal merupakan bentuk usaha yang paling banyak ditemukan di masyarakat. Bentuk usaha yang ini banyak dilakukan oleh masyarakat dengan pendidikan rendah, bermodal kecil, dan tidak mempunyai tempat usaha yang tetap. Sangat mudah mendirikan usaha informal, karena tidak menuntut badan hukum sehingga sangat terbuka bagi siapa saja. Bentuk kemudahan-kemudahan inilah yang menyebabkan keberadaanya menjamur. Dengan banyaknya usaha ini maka banyak tenaga kerja yang akan terserap di sektor ini. Pada Tahun 2023, tenaga kerja yang terserap di sektor informal sebanyak 73,20%. Sedangkan untuk sektor formal sendiri sebesar 26,80%.



Gambar 3. 28 Perbandingan Rata-Rata Upah yang Diterima Buruh dalam Sebulan
Sumber Data: Statistik Ketenagakerjaan Kab. Sumbawa Tahun 2023

Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang diadakan pada Bulan Agustus 2023 upah buruh di Kabupaten Sumbawa baik laki-laki maupun perempuan lebih tinggi dibanding dengan upah buruh yang diterima di tingkat Provinsi sebagaimana tertera pada grafik di atas. Jumlah ini bila dibandingkan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sumbawa masih berada di atas UMK tahun 2023 yaitu sebesar Rp.2.389.000,-. Ini berarti sebagian besar perusahaan di Kabupaten Sumbawa telah menaati peraturan yang berlaku untuk membayarkan upah kepada pegawainya di atas UMK. Meskipun upah yang dibayarkan telah di atas UMK terjadi perbedaan upah yang diterima buruh laki-laki dan buruh perempuan. Salah satu penyebabnya adalah adanya segregasi pekerjaan berdasarkan gender. Pada banyak kasus pekerjaan yang dominan di sektor perempuan, seperti pekerjaan di bidang perawatan kesehatan atau pendidikan, cenderung dibayar lebih rendah daripada pekerjaan yang dominan di sektor laki-laki, seperti konstruksi atau teknik.



Gambar 3. 29 Jumlah penempatan tenaga kerja di luar negeri yang berasal dari Kabupaten Sumbawa menurut negara tujuan tahun 2023
Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbawa, diolah

Memiliki kehidupan finansial yang lebih baik adalah hak setiap orang. Untuk mendapat kehidupan tersebut, sebagian angkatan kerja produktif mencari kerja di luar Kabupaten Sumbawa, bahkan ke luar negeri. Upah tenaga kerja di luar negeri yang lebih menjanjikan menjadi salah satu alasan paling kuat. Pada Tahun 2023, tercatat penempatan sebanyak 1.132 TKI asal Sumbawa yang terdiri dari 74 laki-laki dan 1.058 perempuan dengan negara tujuan Malaysia, Taiwan, Singapura, Hongkong, Brunei Darussalam, Uni Emirat Arab, Arab Saudi dan Korea Selatan seperti yang tertera pada grafik di atas. Yang perlu menjadi sorotan di sini adalah TKI yang bekerja di luar negeri rata - rata masih berpendidikan rendah (SMA/SMK ke bawah) dan mayoritas bekerja sebagai asisten rumah tangga.

Tabel 3. 10 Jumlah Tenaga Kerja di Luar Negeri yang Berasal dari Kabupaten Sumbawa Menurut Pendidikan & Jenis Kelamin Tahun 2023

Pendidikan	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
SD/ sederajat	-	196	196
SMP/ sederajat	-	416	416
SMA/ sederajat	68	327	395
SMK/ sederajat	19	108	129
Diploma/ DIII	-	16	16
Sarjana/ S1	-	-	-
Total	87	1.063	1.150

Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbawa, diolah

3.6. Agama dan Etnis

Kehidupan antar umat beragama di Kabupaten Sumbawa sangat kondusif, karena merupakan salah satu piranti dalam proses pembangunan yang perlu terus dijaga dan dipelihara dalam tatanan berbangsa dan bernegara. Kuatnya iman dan ibadah masyarakat merupakan dasar terwujudnya situasi yang kondusif dalam segala perbedaan baik itu agama, suku dan sosial budaya. Pembangunan sektor agama diarahkan pada upaya peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menciptakan/memelihara kehidupan umat beragama sehingga memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Berkaitan dengan hal tersebut pembangunan sektor agama dilaksanakan melalui peningkatan kelembagaan, pengajaran dan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut. Pemeluk agama Islam merupakan mayoritas di Kabupaten Sumbawa. Terkait fasilitas ibadah sampai dengan tahun 2023 sejumlah 1.012 sarana ibadah seperti masjid 535 unit, 432 unit musholla, 5 unit gereja, 39 unit pura, dan 1 unit Wihara. Demikian pula keberadaan etnis lainnya dengan karakteristik heterogen, yakni terdiri dari 8 kelompok etnis besar yaitu Sumbawa, Sasak, Dompu, Bima, Jawa, Bali, Sunda, Bugis/Makassar, dan etnis lainnya.



Tabel 3. 11 Persentase Penduduk Menurut Agama yang Dianut pada Tahun 2023 semester 1

No.	Agama	Jumlah Penganut	Persentase
1	Islam	503.543	96,48%
2	Kristen Protestan	2.232	0,42%
3	Katholik	2.706	0,52%
4	Hindu	13.077	2,51%
5	Buddha	269	0,063%
6	Konghucu dan Kepercayaan lain	34	0,007%
Jumlah		521.861	100,00%

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat, semester 1 tahun 2023